



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2022

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa Bupati/Wali Kota wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada masyarakat, maka berikut disampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Gorontalo Tahun 2022.

1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Perkembangan indikator makro merupakan cermin kinerja pembangunan Kota Gorontalo yang juga mengindikasikan sejauh mana dampak dari kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran.

Tabel 1 : Capaian kinerja makro Kota Gorontalo

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	TAHUN 2021	TAHUN 2022	PERUBAHAN (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	77,41	78,22	1,046
2	Angka Kemiskinan	5,93	5,73	-3,373
3	Angka Pengangguran	4,55	3,5	-23,077
4	Pertumbuhan Ekonomi	6.347,38	6.607,90	4,104
5	Pendapatan Per Kapita	38,54 juta rupiah**	38,16 juta rupiah**	-0,986



6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,406	0,396	-2,463
---	-------------------------------------	-------	-------	--------

Sumber Data : BPS Kota Gorontalo, 2023

1) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia sebagai indikator ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan Angka Harapan Hidup, pengetahuan yang dihitung dari Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-Rata lama Sekolah, dan penghidupan yang layak dihitung dari Produk Domestik Regional Bruto (keseimbangan kemampuan berbelanja) per kapita.

Tabel 2 : IPM dan Komponen Penyusun IPM

KOMPONEN IPM	TAHUN 2021	TAHUN 2022
Indeks Pembangunan Manusia	77,41	78,22
Angka Harapan Hidup (tahun)	72,53	72,88
Harapan lama Sekolah (tahun)	14,50	14,57
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	10,37	10,39
Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (ribu Rp)	12.390	13.080

Sumber Data : BPS Kota Gorontalo, 2023

Dari tabel 2.2 terlihat IPM Kota Gorontalo tahun 2022 sebesar 78,22, mengalami peningkatan 0,81 poin bila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 77,41. IPM Kota Gorontalo juga menduduki peringkat tertinggi bila dibandingkan dengan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Gorontalo. Keberhasilan pembangunan manusia ini tidak hanya diukur dari tingginya capaian IPM, tetapi dilihat juga dari kecepatan pertumbuhan IPM dalam suatu kurun waktu. Capaian IPM yang meningkat merupakan indikasi positif bahwa kualitas manusia di Kota Gorontalo semakin membaik, dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi.



2) Angka Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan juga dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Tabel 3 : Data Kemiskinan Kota Gorontalo

URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022
Angka Kemiskinan (persen)	5,93	5,73
Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)	12,94	12,67
Persentase penduduk miskin (persen)	5,93	5,73
Indeks kedalaman kemiskinan (P1)	0,79	0,82
Indeks keparahan kemiskinan (P2)	0,22	0,15

Sumber Data : BPS Kota Gorontalo, 2023

Kondisi kemiskinan Kota Gorontalo pada tahun 2022 yang berada pada angka 5,73 persen, mengalami Penurunan -0,2 poin bila dibandingkan dengan tahun 2021 yang berada pada angka 5,93 persen. Begitu pula pada jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 sebanyak 12.940 jiwa, mengalami penurunan menjadi 12.670 jiwa pada tahun 2022. Indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2021 sebesar 0,79 naik menjadi 0,82 di tahun 2022, dan indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2021 sebesar 0,22 turun menjadi 0,15 pada tahun 2022.

Data tersebut mengartikan bahwa kondisi kemiskinan Kota Gorontalo menjadi prioritas Pemerintah Kota Gorontalo dalam mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk baik dari segi kinerja perekonomian maupun penciptaan pemerataan pembangunan serta meningkatkan ketajaman sasaran program pengentasan kemiskinan melalui program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD). Hal ini selaras dengan strategi penanganan kemiskinan yang antara lain meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, mengurangi pengeluaran masyarakat miskin, dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan nasional dan provinsi.



3) Angka Pengangguran

Pembangunan perekonomian juga diukur dengan kondisi ketenagakerjaan, penyediaan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengurangi pengangguran. Dari aspek ketenagakerjaan tingkat pengangguran terbuka tahun 2021 sebesar 4,55 persen menjadi 3,50 persen di tahun 2022. Dari sisi tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2021 sebesar 63,96 persen menjadi 64,64 persen pada tahun 2022.

Tabel 4 : Kinerja Urusan Ketenagakerjaan

URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022
Angka Pengangguran	4,55	3,50
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	63,96	64,64

Sumber Data : BPS Kota Gorontalo, 2023

Adapun komponen pembentuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran, seperti tampak pada tabel berikut :

Tabel 5 : Penduduk Usia 15 tahun ke atas menurut Jenis Kegiatan

KEGIATAN UTAMA	TAHUN 2021	TAHUN 2022
Angkatan Kerja :	109.709	112.554
- Bekerja	104.717	108.617
- Pengangguran Terbuka	4.992	3.937
Bukan Angkatan Kerja :	61.805	61.561
- Sekolah	15.276	16.157
- Mengurus Rumah Tangga	36.631	34.862
- Lainnya	9.898	10.542
Jumlah Total	171.514	174.115

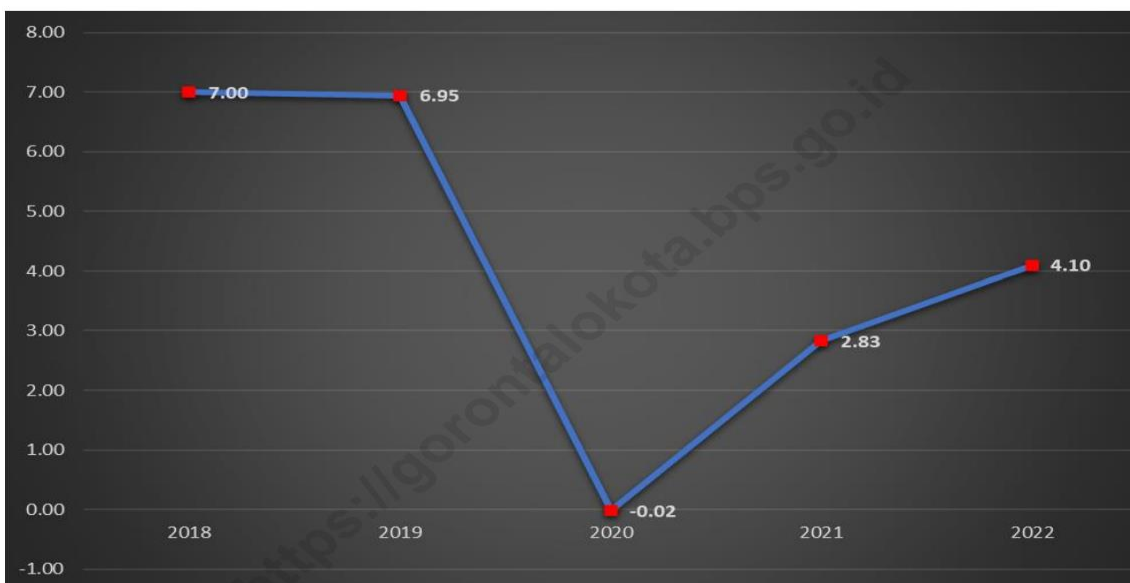
Sumber Data : BPS Kota Gorontalo, 2023

4) Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator makro ekonomi yang penting untuk mengukur kinerja perekonomian adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2019, ekonomi Kota Gorontalo tumbuh sebesar 6,95 persen dan pada tahun 2020 mengalami kontraksi secara tajam, melambat hingga mencapai minus 0,02 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19 yang menghantam Indonesia bagaikan sebuah *perfect storm* yang setidaknya memberi tiga dampak besar bagi perekonomian, yaitu 1) konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60 persen terhadap ekonomi jatuh cukup dalam, 2) pandemi menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah, dan 3) seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun.

Pada Tahun 2022 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kota Gorontalo naik mengalami kenaikan yang sebesar 4,10% hal ini dipengaruhi dengan adanya langkah-langkah dari Pemerintah Kota Gorontalo salah satunya mendorong pertumbuhan UMKM.

Grafik 1 : Pertumbuhan Ekonomi Kota Gorontalo Tahun 2020-2022



Sumber Data : BPS Kota Gorontalo, 2023

5) Pendapatan Per Kapita

PDRB per kapita merupakan nilai dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dalam arti bahwa semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, semakin baik tingkat perekonomian daerah walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. Meskipun masih terdapat keterbatasan, indikator ini sudah cukup



memadai untuk mengetahui tingkat perekonomian suatu daerah dalam lingkup makro, sebagai acuan memantau kemampuan daerah dalam menghasilkan produk domestik barang dan jasa. Nilai tambah yang bisa diciptakan oleh penduduk Kota Gorontalo sebagai akibat adanya aktivitas produksi menurut harga berlaku, menunjukkan trend yang positif. Tahun 2021 PDRB per kapita Kota Gorontalo sebesar Rp. 38.540.000,- dan di tahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 38.160.000,-

6) Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*)

Aspek pemerataan pendapatan juga penting dalam ukuran keberhasilan pembangunan. Peningkatan pendapatan harus sejalan dengan pemerataan pendapatan bagi semua tingkat sosial masyarakat. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan diantara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah sosial.

Dalam mengukur tingkat pemerataan pendapatan salah satunya dapat menggunakan Indeks Gini rasio. Koefisien gini ini merupakan suatu ukuran pemerataan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Karena sulitnya mendapatkan informasi terkait jumlah pendapatan penduduk, maka BPS menggunakan pendekatan pengeluaran, dengan asumsi pengeluaran yang besar tentunya pendapatannya besar pula.

Tabel 6 : Nilai Indeks Gini Kota Gorontalo

TAHUN	INDEKS GINI
2018	0,38
2019	0,377
2020	0,373
2021	0,406
2022	0,396

2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.



Urusan pemerintah wajib terbagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara terdiri dari urusan : (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, (4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, (5) Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat, (6) Sosial. Capaian kinerja urusan pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Gorontalo pada tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut:



Tabel 7 :
Capaian Pelaksanaan Program Dan Kegiatan
Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi		Indikator Program/Kegiatan			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
						Rp	%	Kualitatif	Kuantitatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	173.284.804.638	164.921.342.927	95,17	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%			
1.1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	650.819.719	511.346.390	78,57	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi perangkat daerah	100%	100%			
1.1.1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	156.058.300	117.181.000	75,09	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 Dokumen	100%			
1.1.2				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	45.029.000	38.678.950	85,90	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	100%			
1.1.3				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	36.006.300	35.471.663	98,52	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1 Dokumen	100%			
1.1.4				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.956.424	4.956.424	100,00	Jumlah Dokumen DPA	1 Dokumen	100%			
1.1.5				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	65.190.400	36.026.081	55,26	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	1 Dokumen	100%			
1.1.6				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	187.485.100	157.889.821	84,21	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja	2 Dokumen	100%			
1.1.7				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	156.094.195	121.142.451	77,61	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	5 Dokumen	100%			
1.2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	164.883.389.141	157.431.326.668	95,48	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	100%	100%			
1.2.1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	164.508.939.141	157.084.147.668	95,49	Jumlah ASN yang menerima gaji/tunjangan	1964 Orang	100%			
1.2.2				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	173.400.000	160.484.000	92,55	Frekuensi pembayaran jasa administrasi keuangan	10 Orang	100%			
1.2.3				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	153.000.000	152.165.000	99,45	Jumlah koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	6 Kegiatan	100%			
1.2.4				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	48.050.000	34.530.000	71,86	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	100%			
1.3				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	526.795.000	458.504.000	87,04	Cakupan Layanan Administrasi barang milik daerah	100%	100%			
1.3.1				Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	52.235.000	44.545.000	85,28	Jumlah Tim Pendukung	5 Orang	100%			
1.3.2				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	57.840.000	57.839.000	100,00	Frekuensi Rekonsiliasi dan Penyusunan BMD	4 Triwulan	100%			
1.3.3				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	416.720.000	356.120.000	85,46	Jumlah tenaga administrator keuangan penerima jasa	230 Orang	100%			
1.4				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	968.112.383	837.918.394	86,55	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian	100%	100%			



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi		Indikator Program/Kegiatan			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
						Rp	%	Kualitatif	Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.4.1				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	44.481.000	44.481.000	100,00	Jumlah laporan koordinasi	2 Laporan	100%			
1.4.2				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	113.653.600	96.268.500	84,70	Frekuensi monitoring, evaluasi dan penilaian	2 Kali	100%			
1.4.3				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	160.863.000	128.444.340	79,85	Jumlah pegawai yang diikutsertakan berdasarkan tugas dan fungsi	8 Orang	100%			
1.4.4				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	129.581.200	67.382.336	52,00	Jumlah kegiatan sosialisasi	3 Kegiatan	100%			
1.4.5				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	519.533.583	501.342.218	96,50	Frekuensi Bimbingan Teknis yang dilaksanakan	3 Kegiatan	100%			
1.5				Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.169.093.792	2.006.733.737	92,51	Cakupan Administrasi Umum dan Jasa Lainnya	100%	100%			
1.5.1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	81.134.500	67.595.400	83,31	Jumlah jenis komponen Instalasi	12 Jenis	100%			
1.5.2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.563.300	40.199.915	76,48	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	1 Paket	100%			
1.5.3				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.048.600	5.306.500	25,21	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 Buah	100%			
1.5.4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	152.626.200	120.676.772	79,07	Frekuensi penyediaan bahan logistik kantor	4 Kegiatan	100%			
1.5.5								Jumlah paket makanan dan minuman yang disediakan tiap tahun	8 Kegiatan	100%			
1.5.6				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.658.831	42.507.900	87,36	Jumlah bahan cetakan dan penggandaan yang diadakan setiap tahun	12 Paket	100%			
1.5.7				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.301.140	3.300.000	99,97	Jumlah Ketersediaan Bahan Bacaan	12 Paket	1200%			
1.5.8				Fasilitas Kunjungan Tamu	15.804.456	15.804.456	100,00	Frekuensi fasilitas kunjungan tamu	2 Surat Kabar	100%			
1.5.9				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.793.956.765	1.711.342.794	95,39	Frekuensi pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	36 Kali	100%			
1.6				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	684.077.319	616.084.814	90,06	Cakupan Sarana Prasarana Pemung	100%	100%			
1.6.1				Pengadaan Mebel	278.148.900	267.987.300	96,35	Jumlah pengadaan mebel	1 set	100%			
1.6.2				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	301.880.419	263.847.000	87,40	Jumlah paket pengadaan sarana prasarana gedung kantor	1 paket	100%			
1.6.3				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	104.048.000	84.250.514	80,97	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung	1 Set	100%			
1.7				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.706.873.953	2.416.393.445	89,27	Cakupan Layanan Jasa Penunjang	100%	100%			
1.7.1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.038.500	8.538.500	94,47	Frekuensi penyediaan jasa surat menyurat	12 kali	100%			



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi		Indikator Program/Kegiatan			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
						Rp	%	Kualitatif	Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.7.2				Perediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	191.035.453	180.534.947	94,50	Frekuensi pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	100%			
1.7.3				Perediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.506.800.000	2.227.319.998	88,85	Frekuensi pembayaran perediaan jasa pelayanan umum kantor	12 kali	100%			
1.8				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	695.643.331	643.035.479	92,44	Cakupan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	100%	100%			
1.8.1				Perediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.557.325	39.039.255	80,40	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan operasional	1 unit	100%			
1.8.2				Perediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.761.340	19.092.040	96,61	Frekuensi kegiatan pemeliharaan mobil dinas yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas kedinasan	3 kali	100%			
1.8.3				Pemeliharaan Mebel	10.800.000	3.720.000	34,44	Jumlah pemeliharaan mebel	1 paket	100%			
1.8.4				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.700.000	14.450.960	66,59	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	1	100%			
1.8.5				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	404.486.411	389.072.599	96,19	Frekuensi kegiatan pemeliharaan gedung kantor dalam 1 tahun	3 kali	100%			
1.8.6				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190.338.255	177.660.625	93,34	Jumlah pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana	1 paket	100%			
2			Peningkatan kualitas pendidikan yang berdaya saing dan mendorong penguatan muatan local sebagai salah satu wahana untuk pendidikan karakter dan Entrepreneurship	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	61.232.224.829	49.168.793.634	80,30	Persentase lembaga PAUD dan Pendidikan Dasar yang memenuhi standar sarana dan prasarana	100%	100%			
2.1			Standarisasi dan pemerataan mutu Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	37.854.684.879	31.829.257.744	84,08	Presentase berusia 7 - 12 tahun yang bersekolah di jenjang Sekolah Dasar	100%	100%			
2.1.1			Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.009.984.000	993.523.575	98,37	Jumlah pembangunan ruang guru	1 ruang	100%			
2.1.2			Pengembangan sistem dan mekanisme rekrutmen dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata dalam rangka pemerataan mutu pendidikan dasar 9 tahun	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	465.864.000	369.163.512	79,24	Jumlah pembangunan ruang UKS	11 ruang	100%	Terjadi gagal lelang dalam proses pengadaan pada SDN 31 Kec. Kota Selatan dan terdapat biaya retensi (Pemeliharaan) 5% yang belum dilaksanakan penagihan pada SDN 23 Kec. Duinggi.	Diusulkan kembali pada proses pengadaan Tahun 2023 untuk sisa retensi 5% Dicatat sebagai Hutang dan dilaksanakan penganggaran kembali pada tahun berikutnya	



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi		Indikator Program/Kegiatan			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
						Rp	%	Kualitatif	Kuantitatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.1.3			Penerapan sistem zonasi dalam penerimaan siswa didik dalam rangka pemerataan kualitas pendidikan dasar, menjamin layanan akses bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, dan untuk menghilangkan diskriminasi di sekolah	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	202.765.000	0	0	Jumlah pembangunan ruang perpustakaan	2 ruang	100%	Terjadi gagal lelang dalam proses pengadaan pada SDN 40 Kec. Hulonthalangi	Diusulkan kembali pada proses pengadaan Tahun 2023	
2.1.4			Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan dasar 9 tahun sesuai dengan standar pelayanan minimal dibidang pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.006.216.424	2.817.592.870	93,73	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	20 unit	100%			
2.1.5			Menjamin pendidikan inklusif yang berkualitas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	6.044.683.221	4.483.977.097	74,18	Jumlah ruang kelas yang direhab	25 ruang	100%	Terjadi gagal lelang dalam proses pengadaan pada SD Muhamadiyah Kec. Kota Utara, dan terdapat biaya retensi (Pemeliharaan) 5% yang belum dilaksanakan penagihan pada SDN 23 - 24 Kec. Duingi, dan SDN 37 Kec. Hulonthalangi	Diusulkan kembali pada proses pengadaan Tahun 2023 dan untuk sisa retensi 5% Dicatat sebagai Hutang dan dilaksanakan penganggaran kembali pada tahun berikutnya	
2.1.6			Memberikan bantuan beasiswa kepada siswa miskin	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	394.618.000	372.480.893	94,39	Jumlah ruang guru yang direhab	10 Ruang	100%			
2.1.7			Penyediaan biaya Pendidikan.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	202.251.000	149.354.372	73,85	Jumlah rehabilitasi Toilet	1 Ruang	100%	terdapat biaya retensi (Pemeliharaan) 5% yang belum dilaksanakan penagihan pada SD Muhamadiyah Kota Utara	untuk sisa retensi 5% Dicatat sebagai Hutang dan dilaksanakan penganggaran kembali pada tahun berikutnya	
2.1.8			Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan	Pengadaan Perlengkapan Siswa	347.316.000	343.276.664	98,84	Jumlah pengadaan perlengkapan siswa	1 Paket	100%			
2.1.9			Peningkatan profesionalitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	3.500.000.000	3.495.100.000	99,86	Jumlah pengadaan alat praktik	35 Paket	100%			
2.1.10			Penyediaan BSM bagi siswa yang kurang mampu	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	35.930.100	31.897.000	88,78	Frekuensi Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi	1 Kegiatan	100%			



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi		Indikator Program/Kegiatan			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
						Rp	%	Kualitatif	Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			dan beasiswa prestasi					Peserta Didik					
2.1.1 1			Pengembangan Kompetensi Siswa Berprestasi	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	135.410.830	29.881.700	22,07	Frekuensi kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	4 Kegiatan	100%			
2.1.1 2			Penyediaan infrastruktur pengembangan budaya dan seni tradisional	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	129.226.704	120.480.100	93,23	Jumlah siswa yang berprestasi di tingkat provinsi dan Nasional	24 Siswa	100%			
2.1.1 3			Peningkatan kemampuan tenaga seni dan budaya	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	839.989.500	772.937.400	92,02	Jumlah tenaga pendidik Non PNS	77 Orang	100%			
2.1.1 4				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	78.527.200	75.838.000	96,58	Jumlah kegiatan pengembangan karir	2 Kegiatan	100%			
2.1.1 5				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	2.952.346.900	1.929.899.910	65,37	Jumlah siswa penerima DOS	1829 Siswa	100%			
2.1.1 6				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	16.508.100.000	14.198.755.763	86,01	Jumlah siswa penerima dana BOS	18706 Siswa	100%	Belum maksimalnya proses belanja anggaran operasional sekolah	Tercatat sebagai SILPA dan menjadi pengurang anggaran Pata Tahun 2022	
2.1.1 7				Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2.001.456.000	1.645.098.888	82,20	Jumlah pembangunan ruang laboratorium	37 Ruang	100%	Terdapat biaya retensi (Pemeliharaan) 5% yang belum dilaksanakan penagihan pada SDN 7 - 11 Kec. Kota Barat dan SDN 23-24 Kec. Duingi	Untuk sisa retensi 5% Dicatat sebagai Hutang dan dilaksanakan penganggaran kembali pada tahun berikutnya	
2.2				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	14.873.394.280	12.722.345.392	85,54	Persentasi peserta didik yang berusia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang sekolah menengah pertama	100%	100%			
2.2.1				Pembangunan Laboratorium	509.163.700	400.931.361	78,74	Jumlah pembangunan laboratorium	2 Ruang	100%	Terdapat sisa biaya tender pada SMP N 9 Kota Gorontalo sebesar Rp. 108.232.339	-	
2.2.2				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	454.296.300	424.127.129	93,36	Jumlah pembangunan toilet	4 Ruang	100%			
2.2.3				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	348.943.047	156.894.674	44,96	Jumlah gedung sekolah yang di rehab	10 Gedung	100%	Terdapat kegiatan Rehabilitasi ruang kelas dan ruang guru pada SMP N 13 Kota Gorontalo yang Putus Kontrak dengan sisa anggaran sebesar Rp192.048.	-	



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi		Indikator Program/Kegiatan			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
						Rp	%	Kualitatif	Kuantitatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											373		
2.2.4				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	179.137.000	144.112.953	80,45	Jumlah rehab ruang kelas	2 Ruang	100%			
2.2.5				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	42.652.000	41.771.807	97,94	Jumlah rehab ruang uks	1 Ruang	100%			
2.2.6				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	354.215.277	271.586.688	76,67	Jumlah rehab ruang perpustakaan	1 Ruang	100%	Terdapat sisa biaya tender pada SMP N 6 Kota Gorontalo sebesar Rp. 82.628.589	-	
2.2.7				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	193.380.000	170.717.825	88,28	Jumlah rehab toilet	1 Ruang	100%	Terdapat sisa biaya tender pada SMP N 7 dan SMP N 11 Kota Gorontalo sebesar Rp. 22.662.175	-	
2.2.8				Pengadaan Perlengkapan Siswa	199.939.500	197.276.908	98,67	Jumlah pengadaan perlengkapan siswa	1 Paket	100%			
2.2.9				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	467.858.000	375.600.000	80,28	Jumlah pengadaan alat praktik siswa	11 Paket	100%	Terdapat sisa biaya tender pada 8 SMP Negeri dan Swasta Kota Gorontalo sebesar Rp. 92.258.000	-	
2.2.10				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	10.213.700	7.925.000	77,59	Frekuensi Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1 Kegiatan	100%			
2.2.11				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	255.287.700	214.726.392	84,11	Jumlah siswa yang berprestasi di tingkat provinsi dan Nasional	5 Kegiatan	100%			
2.2.12				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	343.169.700	315.258.500	91,87	Jumlah tenaga pendidik SMP/Non PNS	29 Orang	100%			
2.2.13				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	179.679.200	171.099.600	95,23	Jumlah kegiatan pengembangan karir	3 Kegiatan	100%			
2.2.14				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.484.920.472	692.451.320	46,63	Jumlah siswa penerima DOS	7892 Siswa	100%			
2.2.15				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	9.801.300.000	9.126.090.080	93,11	Jumlah siswa penerima dana BOS	9000 Orang	100%			
2.2.16				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	49.238.684	11.775.155	23,91	Jumlah rehab ruang tata usaha	1 Ruang	100%	Terdapat kegiatan Rehabilitasi ruang TU pada SMP N 13 Kota Gorontalo yang Putus Kontrak dengan sisa anggaran sebesar Rp37.463.5	-	



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi		Indikator Program/Kegiatan			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
						Rp	%	Kualitatif	Kuantitatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											29		
2.3				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7.049.232.240	4.043.885.757	57,37		100%	100%			
2.3.1				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	199.788.000	199.414.280	99,81	Jumlah gedung sekolah yang direhab	15 Ruang	100%			
2.3.2				Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	490.031.740	415.916.381	84,88	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang direhab	7 Unit	100%			
2.3.3				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	175.000.000	174.992.000	100,00	Jumlah lembaga PAUD penerima alat praktik dan peraga siswa	7 Lembaga	100%			
2.3.4				Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	33.790.000	0	0	Frekuensi penyelenggaraan Proses belajar dan Ujian bagi peserta didik	20 Lembaga	100%			
2.3.5				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	2.776.000.000	2.542.000.000	91,57	Jumlah PTK PAUD Non PNS	221 Orang	100%			
2.3.6				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	97.257.100	93.758.800	96,40	Jumlah kegiatan pengembangan karir	3 Kegiatan	100%			
2.3.7				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	170.565.400	97.042.200	56,89	Jumlah lembaga penerima BOP	136 Lembaga	100%			
2.3.8				Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.106.800.000	520.762.096	16,76	Jumlah peserta didik penerima BOP	5000 Peserta Didik	100%	Belum maksimalnya proses pengelolaan keuangan Bantuan operasional Penyelenggaraan PAUD	Tercatat sebagai SILPA dan menjadi pengurang anggaran Pata Tahun 2022	
2.4				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.454.913.430	573.304.741	39,40	Presentase peserta didik yang berusia 7-18 tahun yang bersekolah di jenjang PNF	100%	100%			
2.4.1				Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	36.688.330	36.478.596	99,43	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang direhab	3 Unit	100%			
2.4.2				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	20.225.100	20.176.000	99,76	Jumlah kegiatan pengembangan karir	1 Kegiatan	100%			
2.4.3				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.398.000.000	516.650.145	36,96	Jumlah peserta didik penerima BOP kesetaraan	500 Peserta Didik	100%	Belum maksimalnya proses pengelolaan keuangan Bantuan operasional Penyelenggaraan Non Formal	Tercatat sebagai SILPA dan menjadi pengurang anggaran Pata Tahun 2022	
3				PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	150.171.100	94.715.900	63,07	Persentase kurikulum muatan lokal yang ditetapkan	100%	100%			
3.1				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	102.610.500	94.215.900	91,82	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan	100%	100%			



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi		Indikator Program/Kegiatan			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
						Rp	%	Kualitatif	Kuantitatif	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.1.1				Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	102.610.500	94.215.900	91,82	Jumlah kegiatan Pelatihan Kurikulum Mulok	1 Kegiatan	100%			
3.2				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	47.560.600	500.000	1,05	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang ditetapkan	100%	100%			
3.2.1				Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	19.945.600	0	0	Frekuensi analisis pemetaan PTK PAUD, Dikdas dan PNF/ Kesetaraan	2 Dokumen	200%			
3.2.2				Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	27.615.000	500.000	1,81	Jumlah PTK PAUD, Dikdas dan PTK PNF yang terdistribusi	1 Dokumen	100%			
				TOTAL ANGGARAN	234.667.200.567	214.184.852.461	91%						
1	KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	1. Penguatan Sistem Jaminan pelayanan kesehatan Masyarakat Melalui pemberian jaminan Kesehatan Gratis bagi masyarakat miskin dan kurang mampu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	94.790.384.994	92.882.265.351	97,99	Persentase layanan layanan urusan pemerintahan daerah	100%	100%			
1.1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	326.694.600	226.074.000	69,20	Persentase Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi yang terselesaikan	100%	100%			
1.1.1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan)	108.693.200	83.969.000	77,25	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dok	7 Dok			
1.1.2				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan)	218.001.400	142.105.000	65,19	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan			
1.2			2. Peningkatan surveilans gizi, Revitalisasi Posvandu dan Optimalisasi Layanan tancap nikah serta penguatan kelembagaan peran lintas sektor	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	89.231.168.448	87.920.304.063	98,53	Persentase Layanan Administrasi Keuangan	100%	100%			
1.2.1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Kesehatan)	89.109.362.448	87.798.507.826	98,53	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1043 Orang	1043 Orang			
1.2.2				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dinas Kesehatan)	52.200.000	52.200.000	100,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen			
1.2.3				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Kesehatan)	69.606.000	69.596.237	99,99	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan			
1.3				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	113.106.951	106.054.700	93,76	Persentase Pegawai yang terlayani secara administratif sesuai standar	100%	100%			
1.3.1			3. Penguatan Pelayanan Kesehatan dasar pengendalian penyakit menular dan Penyakit tidak menular	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Kesehatan)	113.106.951	106.054.700	93,76	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 orang				
1.4				Administrasi Umum Perangkat Daerah	354.754.995	351.320.848	99,03	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum selama 12 Bulan	100%	100%			
1.4.1				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Kesehatan)	15.000.000	14996600	99,98	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi		Indikator Program/Kegiatan			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
						Rp	%	Kualitatif	Kuantitatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.4.2				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Kesehatan)	339.754.995	336324248	98,99	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			
1.5			4. Percepatan Eliminasi TB	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.764.660.000	4.278.511.740	89,80	Persentase Pemenuhan Operasional Kantor selama 12 Bulan	100%	100%			
1.5.1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Kesehatan)	3.200.000	3200000	100,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			
1.5.2			5. Peningkatan cakupan dan mutu Imunisasi	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Kesehatan)	1.115.432.212	957.432.325	85,84	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			
1.5.3				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Kesehatan)	27.958.400	27.856.940	99,64	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			
1.5.4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Kesehatan)	3.618.069.388	3290022475	90,93	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			
2			6. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Ibu dan Anak, Pelayanan Kesehatan Pra Nikah Melalui Tancap Nikah serta peningkatan peran lintas sektor	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	30.317.734.690	26.765.552.694	88,28348479	1. Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	95%	98,36%			
								2. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar	100%	100%			
								3. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%	100%			
								4. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100%	100%			
								5. Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	100%			
								6. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SMP)	100%	100%			
								7. Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%			
								8. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%			
								9. Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%			
								10. Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%			
								11. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa	100%	100%			



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi		Indikator Program/Kegiatan			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
						Rp	%	Kualitatif	Kuantitatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								sesuai standar					
								12. Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	100%			
								13. Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%	100%			
2.1				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7.518.759.771	5.767.298.884	76,71	Presentase Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar	100%	100%			
2.1.1				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas (Dinas Kesehatan)	175.000.000	174.800.000	99,89	Jumlah Sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh puskesmas	2 Unit	2 Unit			
2.1.2			7. Penguatan Budaya GERMAS melalui PHBS RT dan sekolah	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dinas Kesehatan)	400.000.000	399.006.000	99,75	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit	2 Unit			
2.1.3				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan (Dinas Kesehatan)	779.782.450	777.210.000	99,67	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	3 Unit	3 Unit			
2.1.4				Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	366.000.000	336.500.000	91,94	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			
2.1.5				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	1.814.919.621	1.486.636.293	81,91	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	431 Unit	445 Unit			
2.1.6				Pengadaan Obat, Vaksin (Dinas Kesehatan)	2.697.913.800	1.960.782.439	72,68	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			
2.1.7			8. Penguatan Peran Lintas Sektor dalam Pelaksanaan Germas	Pengadaan Bahan Habis Pakai(Dinas Kesehatan)	1.285.143.900	632.364.152	49,21	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			
2.2				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.745.892.419	20.952.238.810	92,11	Persentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Puskesmas Sesuai Standar	90%				
2.2.1			10. Peningkatan sumber daya manusia kesehatan, sarana prasarana FKTP dan rumah sakit	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Dinas Kesehatan)	77.523.600	73.466.500	94,77	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1877 Orang	1877 Orang			
2.2.2				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Dinas Kesehatan)	431.187.740	237.955.700	55,19	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2245 Orang	1877 Orang	Dana Jampersal tidak terealisasi karena Juknis Dana Jampersal untuk Rumah Tunggu Kelahiran	Sudah tidak mengusulkan Dana Jampersal berupa Rumah tunggu kelahiran, karena ibu bersalin sudah termasuk	



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi		Indikator Program/Kegiatan			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
						Rp	%	Kualitatif	Kuantitatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											(RTK)	dalam kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	
2.2.3				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Dinas Kesehatan)	45.175.000	45.175.000	100,00	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13123 Orang	13123 Orang			
2.2.4				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Dinas Kesehatan)	38.979.600	38.610.000	99,05	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	32207 Orang	32207 Orang			
2.2.5			11. Penguatan peran pengawasan obat, makanan, minuman dan bahan berbahaya (B3)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Dinas Kesehatan)	35.129.954	28.393.400	80,82	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18018 Orang	18018 Orang			
2.2.6				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Dinas Kesehatan)	32.814.250	32.690.700	99,62	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9503 Orang	9503 Orang			
2.2.7				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Dinas Kesehatan)	23.850.000	22.900.000	96,02	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1820 Orang	1820 Orang			
2.2.8				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Dinas Kesehatan)	500.000.000	500.000.000	100,00	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3474 Orang	3474 Orang			
2.2.9				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (Dinas Kesehatan)	28.700.500	27.602.800	96,18	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen			
2.2.10				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dinas Kesehatan)	86.665.150	51.963.350	59,96	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7 Dokumen	7 Dokumen			
2.2.11				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dinas Kesehatan)	31.303.900	28.668.250	91,58	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen	3 Dokumen			
2.2.12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dinas Kesehatan)	223.733.324	194.725.302	87,03	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen			
2.2.13				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dinas Kesehatan)	142.952.700	140.101.200	98,01	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen			
2.2.14				Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dinas Kesehatan)	125.279.520	116.584.421	93,06	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 Dokumen	10 Dokumen			
2.2.15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (Dinas Kesehatan)	25.453.670	24.720.000	97,12	(Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan)					
2.2.16								Jumlah Pelayanan Kesehatan Jiwa & Napza	215 Orang	215 Orang			
2.2.17				Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus (Dinas Kesehatan)	567.153.900	560.999.100	98,91	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	12 Dokumen	12 Dokumen			
2.2.18				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dinas Kesehatan)	133.654.534	110.888.840	82,97	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen			



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi		Indikator Program/Kegiatan			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
						Rp	%	Kualitatif	Kuantitatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.2.19				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)	17.214.433.897	16.730.807.235	97,19	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen			
2.2.20				Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dinas Kesehatan)	104.827.270	85.349.200	81,42	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	12 Dokumen	12 Dokumen			
2.2.21				Operasional Pelayanan Puskesmas (Dinas Kesehatan)	417.549.085	317.485.800	76,04	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	10 Dokumen	10 Dokumen			
2.2.22				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan)	520.000.000	0	0,00	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	10 Unit	10 Unit	Kementerian Kesehatan belum mengeluarkan regulasi tentang pelaksanaan akreditasi puskesmas, sehingga di Tahun 2022 tidak dilaksanakan akreditasi Puskesmas	Kegiatan akreditasi akan dilaksanakan Tahun 2023 dengan sumber dana DAU	
2.2.23				Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dinas Kesehatan)	1.939.524.825	1.583.152.012	81,63	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	1 Dokumen			
2.3				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	53.082.500	46.015.000	86,69	Presentasi Capaian Mutu Rumah Sakit	100%	100%			
2.3.1				Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan)	53.082.500	46.015.000	86,69	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen			
3				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	365.137.100	340.510.061	93,26	Persentase Fasyankes yang memiliki SDM Kesehatan sesuai dengan Standar Ketenagaan Minimal	100%	100%			
3.1				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	365.137.100	340.510.061	93,26	Presentase Pemenuhan SDM Kesehatan Sesuai Rencana Kebutuhan	100%	100%			
3.1.1				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (Dinas Kesehatan)	339.162.100	317.100.061	93,50	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	23 Orang	23 Orang			
3.1.2				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dinas Kesehatan)	25.975.000	23.410.000	90,13	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5 Dokumen	5 Dokumen			
4				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	99.732.400	89.967.400	90,21	Cakupan penurunan pelanggaran sediaan farmasi dan alat kesehatan dan produk pangan yang tidak sesuai ketentuan					
4.1				Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	49.783.200	44.344.400	89,08	Presentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Mempunyai Izin	100%	100%			



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi		Indikator Program/Kegiatan			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
						Rp	%	Kualitatif	Kuantitatif Target	Kuantitatif Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.1.1				Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dinas Kesehatan)	49.783.200	44.344.400	89,08	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	57 Dokumen	57 Dokumen			
4.2				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	49.949.200	45.623.000	91,34	Presentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang di Terbitkan Sertifikat Laik Higiene	100%	100%			
4.2.1				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dinas Kesehatan)	49.949.200	45.623.000	91,34	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	56 Dokumen	56 Dokumen			
				TOTAL	125.572.989.184	120.078.295.506	96%						
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN (UPTD RSUD ALOEI SABOE)	Peningkatan sumber daya manusia kesehatan, sarana prasarana FKTP dan rumah sakit, dan Penguatan peran pengawasan obat, makanan, minuman dan bahan berbahaya (B3)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	169.287.384.389	159.209.757.195	94,05	Persentase Capaian Mutu Pelayanan Rumah Sakit	76,68%	120%			
1.1				Peningkatan Pelayanan BLUD	169.287.384.389	159.209.757.195	94,05	Jumlah rumah sakit yang melaksanakan kegiatan pelayanan dan penunjang layanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja			
1.1.1				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	169.287.384.389	159.209.757.195	94,05	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja			
2				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	26.660.998.623	22.711.513.293	85,19	Kecepatan Pelayanan Obat Jadi	30 Menit	30 Menit			
								Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Peralatan serta Penunjang Pelayanan	78,00%	85,87%			
2.1				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	26.660.998.623	22.711.513.293	85,19	Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana, Peralatan serta Perbekalan Farmasi	100%	97,71%			
2.1.1				Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	12.834.509.993	9.910.889.906	77,22	Jumlah ruang rawat inap isolasi yang memenuhi standar pelayanan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan	1 Ruang	91,20%	Pembangunan Gedung Isolasi PIE sumber dana PFEN Realisasi Fisik	Pengalokasian Anggaran Biaya Pembangunan Gedung Isolasi serta biaya	



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi		Indikator Program/Kegiatan			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
						Rp	%	Kualitatif	Kuantitatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											91.20% penambahan waktu 20 hari kalender dengan pengenaan denda; Kegiatan Pendukung : 1) Reviu AMDAL Realisasi 0% menunggu justifikasi teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup; 2) Konsultan Pengawas Realisasi 90%;	pendukung kegiatan Pada RKA Tahun Anggaran 2023	
								Jumlah ruang operasi yang memenuhi standar pelayanan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan	2 Ruang	2 Ruang			
2.1.2				Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	11.326.488.630	10.339.853.844	91,29	Jumlah peralatan kesehatan tersedia	288 Unit	287 Unit	1 (satu) unit Harga e-Katalog Melebihi Pagu Anggaran	Perencanaan Alat Kesehatan Tahun 2023 Memasukan Fluktuasi Kurang Dari 5% Terhadap Harga Satuan Alat	
2.1.3				Pengadaan Obat, Vaksin	2.500.000.000	2.460.769.543	98,43	Jumlah Ketersediaan Pelayanan Obat -Obatan Farmasi Rumah Sakit Melalui APBD	12 Bulan	12 Bulan			
3				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	5.600.000.000	3.791.249.993	67,70	Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM Kesehatan	90,00%	58%			
3.1				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	5.600.000.000	3.791.249.993	67,70	Prosentase upaya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	100%	58%			
3.1.1				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	5.600.000.000	3.791.249.993	67,70	Jumlah pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	12 Bulan	7 Bulan	1). Pemenuhan Kebutuhan 5 (lima) bulan Pelayanan Covid 19 di Tahun 2021; 2). Ditahun 2022 sejumlah 4 (empat) bulan pelayanan pasien Covid 19 (Jan s.d April 2022); 3). Pembayaran Biaya	Mengusulkan Anggaran Biaya Insentif Pelayanan Pasien Covid 19 Tahun 2022 Melalui RKA Perubahan Tahun 2023	



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi		Indikator Program/Kegiatan			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
						Rp	%	Kualitatif	Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				TOTAL ANGGARAN	201.548.383.012	185.712.520.481	92%						
1	UNSUR WAJIB KESEHATAN	DINAS KESEHATAN RSUD OTANAH A	Pemenuhan layanan penunjang urusan penunjang pemenuhan Pemerintahan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.210.137.677	2.040.299.696	92,32%	PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN URUSAN PENUNJANG DAERAH	100%	100%			
1.1				ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	249.732.500	241.142.500	92,56%	Persentase pelayanan administrasi keuangan	100%	100%			
1.1.1				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	249.732.500	241.142.500	96,56%	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen			
1.2				PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	868.755.077	758.571.368	87,32%	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			
1.2.1				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	718.755.077	620.571.368	86,34%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan			
1.2.2				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150.000.000	138.000.000	92%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan			
1.3				ADMINISTRASI KEPEGAWIAN PERANGKAT DAERAH	185.190.000	154.232.273	83,28%	Persentase Layanan Adminisrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%			
1.3.1				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	185.190.000	154.232.273	83,28%	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	7 orang	50 orang			
1.4				ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	380.567.700	380.567.700	100%	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%			
1.4.1				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	380.567.700	380.567.700	100%	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 laporan	20 laporan			
1.5				PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	525.892.400	505.785.855	96,18%	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			
1.5.1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	126.536.000	109.292.952	86,37%	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit	6 unit			
1.5.2				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	369.547.100	367.486.403	99,44%	Jumlah sarana/ prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang di pelihara / direhabilitasi	10 unit	20 unit			
1.5.3				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.809.300	29.006.500	97,31%	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas	2 unit	2 unit			



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi		Indikator Program/Kegiatan			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
						Rp	%	Kualitatif	Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								i					
2			Peningkatan Aksebilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan kepada masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	73.168.080.986	59.184.758.812	80,89%	BOR (Bed Occupancy Rate) = Ketersediaan Tempat Tidur	index 1.5	index 1.5			
								ALOS (Averegelage Of Stay) = rata-rata lama rawat seorang pasien	index 2	index 2			
								TOI (Turn Over Interval) = Interval penggunaan tempat tidur dari saat kosong hingga saat terpakai kembali	index 2	index 2			
								BTO (Bed Turn Over) = frekuensi pemakaian tempat tidur dalam satu satuan waktu tertentu	index 2	index 2			
								NDR (Net Death Rate) = Angka Kematian 48 jam setelah pasien di rawat bagi setiap 1000 pasien keluar	index 2	index 2			
								GDR (Gross Death Rate) = Angka Kematian Umum untuk tiap 1000 penderita keluar	index 2	index 2			
2.1				PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	43.761.821.247	40.166.074.098	91,78%	Persentase peningkatan pelayanan kesehatan UKP Rujukan sesuai Standar	100%	100%			
2.1.1				Operasional Pelayanan Rumah Sakit	5.499.777.100	4.417.414.194	80,32%	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	12 Dokumen			
2.2.2				Pengelolaan jaminan Kesehatan Masyarakat	38.262.044.147	35.748.659.904	93,43%	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen			
2.2				PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.406.259.739	19.018.684.714	64,67%	Persentase peningkatan fasilitas layanan kesehatan yang sesuai standar	100%	100%			
2.2.1				Pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan	199.634.000	192.655.644	96,50%	Jumlah Sarana Fasilitas pelayanan kesehatan yang di lakukan pemeliharaan	6 unit	6 unit			
2.2.2				Pengadaan Prasarana dan Pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	16.232.458.184	9.997.124.157	61,58%	Jumlah Prasarana fasilitas Pelayanan Kesehatan yang di sediakan	8 unit	5 unit	- Dikarenakan Hasil Lelang beberapa pekerjaan mengambil hasil lelang yang nilainya turun sampai 20 % - 4 milyar dana PEN di jadikan SILPA pada 2023	Evaluasi harga satuan agar supaya pelaksana bisa menawarkan sesuai Harga Pasaran	
2.2.3				Pengadaan Alat kesehatan / alat penunjang Medik fasilitas	12.974.167.555	8.828.904.913	68,04%	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan	255 unit	224 unit	dikarenakan SILPA PEN 2021 tidak	Penganggaran menyesuaikan	



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi		Indikator Program/Kegiatan			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
						Rp	%	Kualitatif	Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Pelayanan Kesehatan				kesehatan yang di sediakan			bisa digunakan, tetapi untuk menyeimbangkan nilai PEN di rumah sakit, tetap di input di tahun 2022	n dengan kebutuhan	
				TOTAL ANGGARAN	75.378.218.663	61.225.058.508	81%						
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PUPR		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.950.342.976	5.736.710.998,00	44	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,62	91,80			
1.1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	876.017.674	423.123.648	48	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	13 Dok	13 Dok			
1.1.1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	301.562.000	55.165.600	18	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dok	4 Dok			
1.1.2				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	178.358.674	46.640.978	26	Jumlah Dokumen RKA	1 Dok	2 Dok			
1.1.3				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKP	40.719.000	21.175.910	52	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1 Dok	2 Dok			
1.1.4				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	340.378.000	296.664.910	87	Jumlah Laporan Evaluasi Renja, LPPD, dan Renstra	4 Dok	4 Dok			
1.1.5				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,00	3.476.250	23	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	1 Dok	1 Dok			
1.2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.743.365.596	1.735.600.634	26	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	13 Dok	13 Dok			
1.2.1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.650.197.596	1.706.966.634	26	frekuensi Pembayaran Gaji	14 bulan	14 bulan			
1.2.2				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	52.708.000	28.634.000,00	54	Jumlah laporan keuangan	1 Laporan	1 Laporan			
1.2.3				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	40.460.000	12.050.000	30	Jumlah Laporan Realisasi Keuangan	12 Laporan	12 Laporan			
1.3				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	226.669.400	194.905.994	86	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dok	1 Dok			
1.3.1				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	226.669.400	194.905.994	86	Jumlah Kegiatan Bimtek	10 Kegiatan	10 Kegiatan			
1.4				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.391.796.680	1.188.191.407	85	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Jenis/Kali	5 Jenis/Kali			
1.4.1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	785.200	13	frekuensi penyediaan Komponen Instalasi Listrik	12 Bulan	12 Bulan			
1.4.2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.993.980	31.088.300	46	Jumlah peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 Jenis	60 Jenis			
1.4.3				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.592.000	94.340.685	63	frekuensi penyediaan Bahan Logistik	96,00	96,00			



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi		Indikator Program/Kegiatan			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjuk Rekomendasi DPRD
						Rp	%	Kualitatif	Kuantitatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.4.4				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.873.310	12.865.872	81	frekuensi penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4,00	4,00			
1.4.5				Fasilitasi Kunjungan Tamu	70.338.336	12.722.630	18	Jumlah Penyediaan Makanan & Minuman (Tamu)	50,00	50,00			
1.4.6				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.080.999.054	1.036.388.720	96	frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi	50,00	50,00			
1.4.7				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.521.960.006	458.000.000	30	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	42 Unit	42 Unit			
1.4.8				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	508.380.000	458.000.000	90	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Jabatan	1 Unit	1 Unit			
1.4.9				Pengadaan Meubel	108.200.980	107.756.000	100	Jumlah Meubeliar	31 Unit	31 Unit			
1.4.10				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	905.379.026	876.720.550	97	Jumlah Fasilitas Peralatan Gedung Kantor	10 Unit	10 Unit			
1.5				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.770.886.413	1.575.803.423	89	frekuensi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan			
1.5.1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	91.360.000	73.224.000	80	frekuensi Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan			
1.5.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	401.356.413	324.782.473	81	frekuensi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan			
1.5.3				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.278.170.000	1.177.796.950	92	frekuensi Pembayaran Jasa Pelayanan Umum	12 Bulan	12 Bulan			
1.6				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	419.647.207	161.085.892	38	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	59 Unit	59 Unit			
1.6.1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	366.647.207	152.581.702	42	frekuensi Pemeliharaan/Jumlah Pajak Kendaraan Perorangan atau Dinas Jabatan	59 Unit	59 Unit			
1.6.2				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.000.000	8.504.190	16	frekuensi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81 Unit	81 Unit			
2			Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) Wilayah Kota Gorontalo	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.274.781.900	953.624.834	75	Persentase Bangunan Sumber Daya Air yang Di Kelola	100%	100%			
2.1				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.274.781.900	953.624.834	75	Jumlah Bangunan Sumber Daya Air yang dikelola	10 bangunan	10 bangunan			
2.1.1				Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	566.074.400	268.896.150	48	Panjang Bangunan Penguat Tebing	25 Meter	25 Meter			
2.1.2				Rehabilitasi Folder/Kolam Retensi	20.600.000	17.326.400	84	Jumlah Polder/ Kolam Retensi Yang Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			
2.1.3				Normalisasi/Restorasi Sungai	316.257.000	314.185.400	99	Panjang Bantaran Sungai yang Dinormalisasi	1.92 Km	2.00 Km			
2.1.4				Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	5.561.500	4.194.758	75	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang dipelihara	1 Unit	1 Unit			



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi		Indikator Program/Kegiatan			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
						Rp	%	Kualitatif	Kuantitatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.1.5				Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	91.199.000	79.113.926	87	Jumlah Kolam Retensi yang dipelihara	1 Unit	1 Unit			
2.1.6				Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	275.090.000	269.908.200	98	Jumlah Lokasi Check Daam yang dipelihara Tiap Tahun	5 Lokasi	5 Lokasi			
3			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Daerah Dalam Wilayah Kota Gorontalo	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	106.876.277.916	76.047.388.216	71	Persentase Rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	63,59%	56,89%	Realisasi Penyerapan Anggaran Dibawah Dari Pagu Anggaran, Karena Pada Program Ini Tedapat Anggaran PEN Yang Sebagian Yang Belum Terealisasi	Akan dilanjutkan Pada Tahun 2023	
3.1				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	106.876.277.916	76.047.388.216	71	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum	1.010 Jiwa	1.749 Jiwa			
3.1.1				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	375.588.000	302.969.000	81	Jumlah Dokumen DED Pengandaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Layanan	1Dokumen	1Dokumen			
3.1.2				Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	2.349.428.823	1.744.007.050	74	Jumlah Dokumen Pengawasan Kegiatan Kelompok Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur, Kategori Sumber Air Minum Layak	1 Dokumen	1 Dokumen			
3.1.3				Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	104.151.261.093	74.000.412.166	71	Pengadaan/ Pemasangan Genset dan Accesories Power 140 KVA	1 unit	1 unit			
4				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.620.776.400	1.540.419.800	95	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	82,00%	82,00%			
4.1				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.620.776.400	1.540.419.800	95	Jumlah Warga Negara Yang Memiliki Sanitasi Layak	500 Jiwa	500 Jiwa			
4.1.1				Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	389.464.900	315.417.500	81	Jumlah Dokumen Pengawasan	1 Dokumen	1 Dokumen			
4.1.2			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Wilayah Kota Gorontalo	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	75.000.000	71.054.300	95	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Tangki Septik) Yang Terbangun	5 Unit	5 Unit			
4.1.3				Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1.156.311.500	1.153.948.000	100	Jumlah Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik Yang Terbangun	25 Unit	25 Unit			
5				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	12.144.116.082	9.218.546.187	76	Presentase Pengurangan Luas Genangan Banjir dikawasan-kawasan Pusat Layanan dan Pusat Kota	89,97%	87,00%			
5.1			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik di	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung	12.144.116.082	9.218.546.187	76	Panjang Saluran yang terhubung dengan sungai lintas daerah	10 Km	10 Km			



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi		Indikator Program/Kegiatan			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
						Rp	%	Kualitatif	Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Wilayah Kota Gorontalo	dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota									
5.1.1				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	574.990.000	386.358.100	67	Jumlah Dokumen Perencanaan Penataan Drainase Perkotaan dan Lingkungan	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	631.625.000	509.340.000	81	Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase	12 Dok	12 Dok			
5.1.2				Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	10.216.931.332	7.667.156.003	75	Panjang Drainase Perkotaan dan Lingkungan Yang dibangun / Direvitalisasi	10 Km	10 Km			
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Wilayah dan Kawasan Strategis Kota Gorontalo	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	720.569.750	655.692.084	91	Operasi Rutin dan Pemeliharaan Saluran Pengendali Banjir	3 Lokasi	3 Lokasi			
6				PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	5.956.465.100	5.280.989.798	89	Persentase Jalan Setapak Yang Terbangun	100,00%	100,00%			
6.1				Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	5.956.465.100	5.280.989.798	89	Panjang Jalan Setapak Yang Terbangun	1.334 Meter	7.462 Meter			
6.1.1				Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	5.956.465.100	5.280.989.798	89	Panjang Jalan Setapak Yang Terbangun	1.334 Meter	7.462 Meter			
7				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	432.598.700	340.483.448	79	Persentase Kesesuaian Aktivitas Pendirian Bangunan Dengan Arah Rencana Tata Ruang dan Penataan Bangunan Gedung	100,00%	100,00%			
7.1				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	432.598.700	340.483.448	79	Jumlah Advis Teknis Yang Sesuai Arah Tata Ruang	240,00	240,00			
7.1.1			Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung di Wilayah Kota Gorontalo	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta	401.798.700	340.483.448	85	umlah Advis Teknis Yang Sesuai Arah Tata Ruang	240 Advis	240 Advis			
7.1.2				Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/ Kota	30.800.000	480.000	2	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan	2 Bangunan	2 Bangunan			
8				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	10.200.239.499	6.703.237.825	66	Persentase Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik	87,50%	87,50%			



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi		Indikator Program/Kegiatan			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
						Rp	%	Kualitatif	Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.1				Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	10.200.239.499	6.703.237.825	66	Akumulasi Bangunan Gedung Yang Dibangun dan dipelihara	5 Bangunan	9 Bangunan			
8.1.1			Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungan di Wilayah Kota Gorontalo	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	780.935.800	378.910.800	49	Jumlah Dokumen Perencanaan Penataan, Serta Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintah	4 Dokumen	4 Dokumen			
8.1.2				Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	566.340.000	379.986.240	67	Jumlah Dokumen Konsultasi Pengawasan	4 Dokumen	4 Dokumen			
8.1.3				Penataan Bangunan dan Lingkungan	8.452.963.699	5.944.340.785	70	Jumlah Bangunan Gedung Yang Dibangun dan Lingkungannya	4 Bangunan	9 Bangunan			
8.1.4				Pemeliharaan Bangunan Dan Lingkungan	400.000.000	379.421.450	95	Jumlah Bangunan Gedung Yang Dipelihara	1 Bangunan	1 Bangunan			
9				Program Penyelenggaraan Jalan	107.403.046.017	57.038.127.629	53	Persentase Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik	84,70%	70,41%			
9.1				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	107.403.046.017	57.038.127.629	53	Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik dan Mantap	5 Km	5 Km			
9.1.1			Penataan dan Pemeliharaan Jalan Kota serta pendukungnya	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.068.010.050	681.406.494	64	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Jasa Konsultan Pengawas Jalan	4 Dokumen	4 Dokumen			
9.1.2				Survey Kondisi Jalan/Jembatan	260.000.000	46.982.331	18	Jumlah Ruas Jalan yang di Survei	412 Ruas Jalan	412 Ruas Jalan			
9.1.3				Rekonstruksi Jalan	99.471.476.264	53.693.306.077	54	Panjang Jalan yang direkonstruksi	13.813 Km	13.813 Km			
9.1.4				Pemeliharaan Berkala Jalan	5.304.492.372	1.822.943.432	34	Panjang Jalan Yang Dipelihara Secara Berkala	3.021 Km	3.021 Km			
9.1.5				Pemeliharaan Rutin Jalan	1.299.067.331	793.489.295	61	Jumlah Ruas Jalan yang dipelihara	13 Ruas Jalan	13 Ruas Jalan			
10				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	599.500.200	191.334.435	32	PERSENTASE SUMBER DAYA KONSTRUKSI YANG TERLATIH	40%	40%			
10.1				Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	599.500.200	191.334.435	32	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Bimtek Tentang Jasa Konstruksi	200 Orang	200 Orang			
10.1.1			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	414.000.000	138.993.581	34	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Bimtek Tentang Jasa Konstruksi	100 Orang	100 Orang			
10.1.2			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah di Wilayah Kota Gorontalo	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	185.500.200	52.340.854	28	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Bimtek Tentang Jasa Konstruksi	100 Orang	100 Orang			
11				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.049.645.607	1.629.961.346	80	Persentase Pemanfaatan Ruang Diwilayah Kota Gorontalo Sesuai PERDA RTRW Nomor 9 Tahun 2019	19,02%	19,02%			
11.1			Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Gorontalo	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	822.186.987	644.779.687	78	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Yang Dihasilkan	1 Dokumen	1 Dokumen			



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi		Indikator Program/Kegiatan			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
						Rp	%	Kualitatif	Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.1.1				Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	18.350.330	4.798.000	26	Jumlah Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)	1 Dokumen	1 Dokumen			
11.1.2				Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	629.408.190	474.179.550	75	Akumulasi Jumlah Kebijakan/ Aturan Teknis Yang di Amanatkan dalam RTRW	3 Aturan	3 Aturan			
11.1.3				Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	187.899.800	165.802.137	88	Sosialisasi Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo	1 Kali	1 Kali			
11.2				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	372.856.260	357.525.932	96	Jumlah Persetujuan dan Rekomendasi Rencana RDTR	1 Dok	1 Dok			
11.2.1				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	372.856.260	357.525.932	96	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi	1 Dok	1 Dok			
11.3			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Kota Gorontalo	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota	329.998.300	237.480.000	72	Akumulasi Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	3 Kegiatan	3 Kegiatan			
11.3.1				Sistem Informasi Penataan Ruang	329.998.300	237.480.000	72	Aplikasi serta Peralatan Pendukung Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Aplikasi	1 Aplikasi			
11.4				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	524.604.060	390.175.727	74	Jumlah Bangunan Yang Diterbitkan	71 Bangunan	71 Bangunan			
11.4.1				Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	52.756.330,00	39.083.800	74	Jumlah Pelanggaran Tata Ruang Yang Sudah dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah Terkait	10 Teguran	10 Teguran			
11.4.2			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota Gorontalo	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	121.525.800,00	130.272.089	107	Jumlah ASN Yang Menikuti Pelatihan PPNS Serta Peningkatan Kapasitas PPNS	4 Orang	4 Orang			
11.4.3				Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	350.321.930	220.819.838	63	Jumlah Teguran yang dikeluarkan terhadap bangunan yang melanggar Penataan Ruang	65 Teguran	65 Teguran			
				TOTAL ANGGARAN	261.075.191.697	164.340.341.068	63%						
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	4.418.754.004	3.649.984.570	83	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100			
1.1				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	318.778.300	317.984.000	100	Persentase Hasil Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dokumen	13 Dokumen			
1.1.1			Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	110.212.000	109.419.900	99	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra Revisi, Renja Induk dan Perubahan, PK, IKU, RAPK)	6 Dokumen	6 Dokumen			



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi		Indikator Program/Kegiatan			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
						Rp	%	Kualitatif	Kuantitatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	125.856.000	125.856.000	100	Jumlah Dokumen (RKA, DPA induk Perubahan dan pergeseran)	4 Dokumen	4 Dokumen			
1.1.3				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	82.710.300	82.709.100	100	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja (LKIP, LKRJ, LPPD)	3 Dokumen	3 Dokumen			
1.2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.770.956.224	2.711.820.060	98	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100			
1.2.1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.629.612.824	2.570.617.810	98	Jumlah Orang yang menerima Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang	26 Orang			
1.2.2			Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	104.328.000	104.328.000	100	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen			
1.2.3				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	37.015.400	36.874.250	100	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan			
1.3				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95.780.000	87.186.136	91	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100			
1.3.1				Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	5.250.000	5.185.000	99	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	12 Kali	12 Kali			
1.3.2				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	90.530.000	82.001.136	91	Jumlah aparat yang mengikuti bintek peraturan perundang-undangan	13 Orang	13 Orang			
1.4				Administrasi Umum Perangkat Daerah	475.727.640	467.648.900	98	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100			
1.4.1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3.259.800	3.217.500	99	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan			
1.4.2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.465.700	47.052.820	99	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan			
1.4.3				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.930.000	44.911.432	100	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan			
1.4.4				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.470.600	12.378.090	99	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan			
1.4.5			Pemenuhan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Fasilitas Kunjungan Tamu	17.500.000	17.479.700	100	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Kunjungan Tamu	12 Bulan	12 Bulan			
1.4.6				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.101.540	342.609.358	98	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	26 Laporan	26 Laporan			
1.5				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	199.858.900	198.629.039	99	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100			
1.5.1				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.858.900	198.629.039	99	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	26 Unit	26 Unit			
1.6				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	342.398.340	318.236.713	93	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	100	100			



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi		Indikator Program/Kegiatan			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
						Rp	%	Kualitatif	Kuantitatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Pemerintah Daerah					
1.6.1				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	129.968.340	123.561.913	95	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan			
1.6.2				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	212.430.000	194.674.800	92	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan			
1.7				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215.254.600	212.557.172	99	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100	100			
1.7.1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7.400.000	5.513.320	75	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara dan dibayar pajak dan perizinannya	12 Unit	12 Unit			
1.7.2				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.000.000	58.750.662	100	jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	12 Kali	12 Kali			
1.7.3				Pemeliharaan/ rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	148.854.600	148.291.190	100	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			
2				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3.380.817.157	2.698.725.943	80	Persentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh	10,04 % (20,76 Ha)	31 % (6,61 Ha)			
2.1				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	3.380.817.157	2.698.725.943	80	Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	10,04 % (20,76 Ha)	31 % (6,61 Ha)			
2.1.1				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.685.039.410	1.055.889.804	63	Jumlah Rumah tidak layak huni yang diperbaiki	60 Unit	30 Unit	Perencanaan awal dengan Pagu awal setelah pelaksanaan Kegiatan menyesuaikan dengan pagu yang disetujui sehingga SIPD belum dapat menyesuaikan anggaran perubahan tersebut	Perbaikan SIPD	
2.1.2				Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Berserta PSU	1.282.437.242	1.260.260.123	98	Jumlah Dokumen kesepakatan Kerjasama dalam Perbaikan Rumah tidak Layak Huni Berserta PSU	6 Dokumen Pekerjaan	6 Dokumen Pekerjaan			
2.1.3				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	413.340.505	382.576.016	93	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	1 Dokuemn	1 Dokume n			
3				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	844.402.980	813.287.630	96	Persentase Jumlah rumah Tidak layak huni	32%				
3.1			Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur pada Kawasan Pelayanan Pemerintahan Kawasan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	52.842.000	39.999.450	76	Data Rumah Korban Bencana dan yang terdampak Program Kab/Kota	100%	100%			



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi		Indikator Program/Kegiatan			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
						Rp	%	Kualitatif	Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pelayanan Ekonomi Kawasan Pelayanan Sosial dan Kawasan Permukiman										
3.1.1				identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten/kota	52.842.000	39.999.450	76	Jumlah Dokumen data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang berpotensi Terkena relokasi Program Kab/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			
3.2				Pendistribusian dan serah terima bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	646.113.500	645.344.950	99,88	Persentase Penyediaan rumah Layak Huni bagi Korban Bencana atau relokasi Program Kab/Kota	2 Unit	8 Unit (7 Huntap 1 Huntara)			
3.2.1				Pelaksanaan pembagian rumah bagi korban bencana kabupaten/kota atau relokasi program kabupaten/kota	646.113.500	645.344.950	99,88	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten / Kota yang terkena relokasi Program Kabupaten/Kota	2 unit	8 Unit (7 Huntap 1 Huntara)			
3.3				Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	145.447.480	127.943.230	87,96	Persentase Pembinaan dan Pengelolaan Rumah susun dan /Atau rumah Khusus	1 Rusun	1 Rusun			
3.3.1				Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan /atau Rumah Khusus	145.447.480	127.943.230	87,97	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan / Atau Rumah Khusus	1 Rusun	1 Rusun			
4				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	8.793.537.845	8.736.501.367	99,35	Persentase satuan Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	3 Kawasan	3 Kawasan			
4.1				Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	8.793.537.845	8.736.501.367	99,35	Cakupan Kawasan Perkotaan yang didukung dengan sarana prasarana utilitas yang baik	3 Kawasan	3 Kawasan			
4.1.1				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	8.793.537.845	8.736.501.367	99,35	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana Sarana dan Utilitas umum yang menunjang Fungsi Hunian	3 Kawasan	3 Kawasan			
				TOTAL ANGGARAN	17.437.511.986	15.898.499.510	91%						
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA LINMAS	SATPOL PP	Menjamin ketenteraman, ketertiban umum dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.441.544.000	6.421.663.031	99,69%	Persentase Pelanggaran Perda Dan Perkada yang ditegakkan	75%	99,69%	-		
								Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	75%	99,69%			
								Persentase Pemberdayaan Petugas Linmas	40%	99,69%			
1.1			Meningkatkan peran serta masyarakat dan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan gangguan TRANTIBUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	6.441.544.000	6.421.663.031	99,69%	Jumlah Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kota Gorontalo	65 Kegiatan	65 Kegiatan	-		
1.1.1				Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,	4.000.794.000	3.980.938.031	99,50%	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,	25 Kasus	25 Kasus	-		



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi		Indikator Program/Kegiatan			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
						Rp	%	Kualitatif	Kuantitatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Pengamanan, dan Pengawasan				Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan					
1.1.2				Penindakan Atas Gangguan Ketertarikan Dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	2.440.750.000	2.440.725.000	100,00%	Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	40 Kasus	40 Kasus			
2				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.842.726.544	6.732.652.823	98,39%	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	98,39%	-		
2.1				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.761.752.928	6.658.294.435	98,47%	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	12 Kali/2 Dokumen	12 Kali/2 Dokumen	-		
2.1.1				Perediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	6.311.800.544	6.217.424.435	98,50%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/ 25 Kali	67 Orang/ 25 Kali	-		
2.1.2				Perediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	449.952.384	440.870.000	97,98%	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	-		
2.2			Meningkatkan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.973.616	74.358.388	91,83%	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Jasa / (12 Kali)	1 Jasa / (12 Kali)	-		
2.2.4				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	80.973.616	74.358.388	91,83%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan/4 8 Rekening	12 Kali/48 Rekening	-		
				TOTAL ANGGARAN	116.798.600	116.706.090	100%						
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA LINMAS	BPBD	Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.592.383.544	4.359.985.869	94,94%	Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%			
1.1			Membangun sistem pengurangan resiko bencana dan kesiapsiagaan terpadu	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.947.500	31.747.500	99,37%	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	6	6			
1.1.1			Membangun sistem komando dan mobilisasi sumber daya penanggulangan bencana yang cepat dan handal	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	14.616.000	14.616.000	100,00%	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3			
1.1.2			Penambahan pos damkar, personil dan sarana prasarana	koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	17.331.500	17.131.500	98,85%	Jumlah Dokumen RKA	3	3			
1.2			Mengadakan pelatihan/bimbingan teknis atau mengirim peserta pelatihan/bimbingan teknis	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.352.798.916	3.315.197.664	98,88%	PresentaseLayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%			
1.2.1			Perkuatan kebijakan dan kelembagaan	Perediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.306.742.916	3.271.901.664	98,95%	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 / 35 ASN	14 / 35 ASN			



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi		Indikator Program/Kegiatan			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
						Rp	%	Kualitatif	Kuantitatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.2				Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	46.056.000	43.296.000	94,01%	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12			
1.3				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	38.075.200	37.625.200	98,82%	Persentase pemenuhan layanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%			
1.3.1				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	38.075.200	37.625.200	98,82%	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	5			
1.4				Administrasi Umum Perangkat Daerah	366.716.964	331.369.272	90,36%	Persentase Layanan Administrasi Umum	100%	100%			
1.4.1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	2.726.643	170.000	6,23%	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12			
1.4.2				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	17.318.400	6.219.000	35,91%	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	12			
1.4.3				Penyediaan Bahan Logistik kantor	36.763.900	19.172.650	52,15%	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30	30			
1.4.4				Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	14.768.021	11.517.039	77,99%	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang Disediakan	12	12			
1.4.5				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	295.140.000	294.290.583	99,71%	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12			
1.5				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.300.304	185.675.821	92,70%	Frekuensi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
1.5.1				Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	73.580.304	66.325.821	90,14%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	12			
1.5.2				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	126.720.000	119.350.000	94,18%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12			
1.6				Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	602.544.660	458.370.412	76,07%	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	100%			
1.6.1				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	28.235.000	21.814.000	77,26%	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan biaya	12	12			
1.6.2				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	101.811.630	79.755.946	78,34%	Jumlah kendaraan perorangan dinas operasional atau lapangan yang di pelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12	12			
1.6.3				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	28.675.007	21.511.216	75,02%	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12	12			
1.6.4				Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	443.823.023	335.289.250	75,55%	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	12	12			
2				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	638.802.748	504.594.734	78,99%	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	100%	100%			
2.1				Pelayanan Informasi Rawan bencana Kabupaten/Kota	0	-	0,00%	Persentase penduduk dikawasan yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai	0%	0%			



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi		Indikator Program/Kegiatan			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
						Rp	%	Kualitatif	Kuantitatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								jenis bencana					
2.2.1				Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (Perjenis bencana)	0	-	0,00%	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	0	0			
2.2				Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	560.129.748	486.101.734	86,78%	Persentase pelayanan pencegahan	100%	100%			
2.2.1				Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	308.034.600	282.911.500	91,84%	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	18	18			
2.2.2				Penguatan Kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	70.753.500	69.875.000	98,76%	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	3	3			
2.2.3				Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	181.341.648	133.315.234	73,52%	Jumlah Bantuan Stimulan pascabencana	20	20			
2.3				Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	78.673.000	18.493.000	23,51%	Presentase ketersediaan sarana prasarana pendukung penanggulangan bencana	100%	0%			
2.3.1				Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	41.724.000	18.493.000	44,32%	Jumlah SK Penetapan Status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen Laporan Kaji Cepat	500	0			
2.3.2				Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	36.949.000	-	0,00%	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	10	1	Anggaran ini fokus pada pencarian / evakuasi korban yang hanyut/hilang (tidak ada kejadian)	Merasionalisasikan penganggaran	
3				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	371.675.000	341.980.000	92,01%	Persentase cakupan layanan kebakaran	100%	100%			
3.1				Inspeksi peralatan proteksi kebakaran	9.975.000	9.880.000	99,05%	Jumlah Laporan/informasi peralatan proteksi kebakaran	100%	100%			
3.1.1				Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	9.975.000	9.880.000	99,05%	Jumlah data hasil dan pemetaan pemantauan terhadap alat pemadam api ringan (APAR)	9	9			
3.2				Investigasi kejadian kebakaran	361.700.000	332.100.000	91,82%	Persentase layanan pemadaman dan penyelamatan korban yang terdampak kebakaran	100%	100%			
3.2.1				Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian	361.700.000	332.100.000	91,82%	Jumlah aparat pemadam kebakaran yang bertugas ritun dan bertanggungjawab	23	23			



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi		Indikator Program/Kegiatan			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
						Rp	%	Kualitatif	Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				kebakaran									
3.3				Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan kebakaran	0	-	0,00%	Jumlah masyarakat yang paham tentang penampungan bencana kebakaran	0%	0%			
3.3.1				Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	0	-	0,00%	jumlah peserta sosialisasi dan simulasi penanggulangan bahaya kebakaran	0	0			
				TOTAL ANGGARAN	13.284.270.544	13.154.315.854	99%						
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Penguatan Kelembagaan dan SDM Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	4.323.095.470	3.635.013.728	84,08	Indeks Partisipasi Sosial	100%	42,76%			
1.1				Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	117.746.200	117.398.800	99,70	Jumlah Pemberdayaan Sosial komunitas adat terpencil	11.200 KPM	11.200 KPM			
1.1.1				Fasilitasi Pemberdayaan Sosial (KAT)	111.746.200	111.398.800	99,69	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10690KPM	10690KPM	Untuk Kegiatan Fasilitasi KAT atas Rekomendasi dari BPKP tidak bisa lagi di Kota Gorontalo karena di Kota Gorontalo sudah tidak ada lagi KAT	Semua Anggaran kegiatan yang ada di kegiatan ini di Pindahkan ke kegiatan yang lain tetapi masih dalam 1 Program	
1.1.2				Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	6.000.000	6.000.000	100,00	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10690 KPM	10690 KPM			
1.2				Pengumpulan Sumbangan dalam daerah Kab/Kota	55.983.700	53.073.900	94,80	Jumlah pengajuan pengumpulan sumbangan yang ditangani	15 Dokumen	15 Dokumen			
1.2.1				Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Ijin Undian Gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	55.983.700	53.073.900	94,80	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Ijin Undian Gratis berhadiah dan Pengumpulan uang atau Barang	15 Dokumen	15 Dokumen			
1.3				Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kab/kota	4.149.365.570	3.464.541.028	83,50	Jumlah pelaksanaan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial	12 Kali	12 Kali			
1.3.1				Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	346.697.400	334.436.000	96,46	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	77 Orang	77 Orang			
1.3.2				Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan kewenangan kabupaten/kota	227.748.400	225.780.280	99,14	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	9 Kecamatan	9 Kecamatan			
1.3.3				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan	3.495.072.970	2.828.939.548	80,94	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan	10745 Orang	10745 Orang	▪ Bantuan Sosial Kube	▪ Penerima Bantuan Sosial	



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi		Indikator Program/Kegiatan			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
						Rp	%	Kualitatif	Kuantitatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				Kabupaten/Kota			Persyaratan Utamanya untuk Penerima PKM Wajib Terdaftar Dalam Data DTKS	adalah PKM yang Terdaftar dalam DTKS Jika belum maka akan di daftarkan melalui mekanisme pendaftaran DTKS	
1.3.4				Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga-lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	79.846.800	75.385.200	94,41	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Sertifikat	5 Sertifikat			
2			Perluasan Peningkatan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	8.983.000	8.795.100	97,91	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	80%	95,60%			
2.1				Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik debarkasi di daerah kab/kota untuk dipulangkan ke desa/keurahan asal	8.983.000	8.795.100	97,91	Jumlah pelaksanaan pemulangan warga korban tindak kekerasan	1 Tahun	1 Tahun			
2.1.1				Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan dari Titik debarkasi di daerah kab/kota untuk dipulangkan ke desa/keurahan asal	8.983.000	8.795.100	97,91	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarisasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang			
3			Perluasan Peningkatan Pelayanan dasar Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia terlanjar serta Gelandangan dan Pengemis	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.561.708.090	1.454.630.181	93,14	Indeks Rehabilitasi Sosial PMKS	80%	94,86%			
3.1				Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlanjar, anak terlanjar, lanjut usia	1.229.484.390	1.157.887.106	94,18	Jumlah penyandang disabilitas terlanjar, Anak Terlanjar, Lanjut Usia Terlanjar, serta	100 Orang	100 Orang			



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi		Indikator Program/Kegiatan			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
						Rp	%	Kualitatif	Kuantitatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				terlantar, serta gelandangan, pengemis diluar panti sosial				Gelandangan Pengemis diluar Panti yang dipenuhi kebutuhan dasarnya					
3.1.1				Penyediaan Permakanan	406.506.000	374.088.500	92,03	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	90 Orang			
3.1.2				Penyediaan Sandang	114.392.700	105.076.000	91,86	Jumlah Penyediaan Sandang	100 Orang	90 Orang			
3.1.3				Penyediaan Alat bantu	93.869.300	84.961.000	90,51	Jumlah Penyediaan Alat Bantu	41 Orang	41 Orang			
3.1.4				Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	40.565.300	39.683.900	97,83	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	3 Orang			
3.1.5				Pemberian Bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	265.718.050	261.474.248	98,40	Jumlah pemberian Bimbingan Fisik Mental, Spritual dan Sosial (PMKS)	45 Orang	45 Orang			
3.1.6				Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	110.744.200	102.434.406	92,50	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	250 Orang			
3.1.7				Pemberian data dan pengaduan	184.864.440	177.348.852	95,93	Jumlah Pemberian Data dan Pengaduan	50 Orang	50 Orang			
3.1.8				Pemberian layanan kedaruratan	12.824.400	12.820.200	99,97	Jumlah Pemberian Layanan Kedaruratan	5 Orang	5 Orang			
3.2				Rehabilitasi sosial penyandang masalah kejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/Aids dan NAPZA diluar panti sosial	332.223.700	296.743.075	89,32	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 Orang	100 Orang			
3.2.1				Pemberian layanan kedaruratan	29.785.000	26.760.400	89,85	Jumlah Pemberian Layanan Kedaruratan	5 Orang	5 Orang			
3.2.2				Penyediaan Permakanan	114.987.400	84.438.475	73,43	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	37 Orang	Tidak bisa diprediksi berapa jumlah klien/orang yang akan ditangani di Rumah Singgah	Karena Kurangnya Fasilitas SDM dan sarana Prasarana di Rumah Singgah sehingga tidak semua Klien yang bisa di titipkan di Rusing di tangani dengan baik.	
3.2.3				Penyediaan Sandang	105.419.100	105.284.000	99,87	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1	19 Orang	37 Orang			



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi		Indikator Program/Kegiatan			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
						Rp	%	Kualitatif	Kuantitatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								tahun Kewenangan Kabupaten/Kota					
3.2.4				Penyediaan perbekalan kesehatan diluar panti	6.242.500	6.242.500	100,00	Jumlah Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	20Orang	20Orang			
3.2.5				Pemberian bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial	75.789.700	74.017.700	97,66	Jumlah Pemberian bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial	30 Orang	30 Orang			
4				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.130.816.800	1.092.985.193	96,65	Persentase Fakir Miskin dan PMKS yang mendapatkan Perlindungan Jaminan Sosial	20%	20%			
4.1				Pengelolaan data fakir Miskin Cakupan daerah Kab/Kota	1.130.816.800	1.092.985.193	96,65	Jumlah dokumen pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	1 Dokumen	1 Dokumen			
4.1.1				Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	352.035.800	337.135.610	95,77	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	25.219 Org	25.219 Org			
4.1.2				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	78.310.700	75.969.600	97,01	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	6.797 Keluarga	6.797 Keluarga			
4.1.3				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	700.470.300	679.879.983	97,06	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	26 Orang	26 Orang			
5			Perluasan dan Peningkatan Pelayanan dasar Korban Bencana alam dan Sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	646.295.050	643.558.833	99,58	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang ditangani	80%	98,96%			
5.1				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota	531.370.550	530.711.854	99,88	Presentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	80%	99,42%			
5.1.1				Penyediaan Makanan	425.718.650	425.273.441	99,90	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 Org	2800 Jiwa			
5.1.2				Penyediaan Sandang	105.651.900	105.438.413	99,80	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Org	168 Jiwa			
5.2				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kab/Kota	114.924.500	112.846.979	98,19	Jumlah dokumen pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	1 Dokumen	1 Dokumen			
5.2.1				Koordinasi , sosialisasi dan pelaksanaan Taruna siaga bencana	114.924.500	112.846.979	98,19	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Org	200 Orang			
6			Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.537.132.261	5.358.065.634	96,77	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			
6.1				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.262.920	34.980.100	99,20	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	1 Dok	1 Dok			



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi		Indikator Program/Kegiatan			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
						Rp	%	Kualitatif	Kuantitatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.1.1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.820.600	6.778.500	99,38	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 Dok	5 Dok			
6.1.2				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.865.700	6.758.500	98,44	Jumlah Dokumen RKA	1 Dok	1 Dokumen			
6.1.3				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.701.620	9.619.100	99,15	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1 Dok	1 Dokumen			
6.1.4				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	11.875.000	11.824.000	99,57	Jumlah Dokumen Laporan	1 Dok	1 Dokumen			
6.2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.652.335.082	3.503.838.833	95,93	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100			
6.2.1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.553.895.082	3.405.398.833	95,82	Frekuensi Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Kali	12 Kali			
6.2.2				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	98.440.000	98.440.000	100,00	Frekuensi Penataan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	12 Kali	12 Kali			
6.3				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	187.612.925	187.347.376	99,86	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100			
6.3.1				Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	39.650.000	39.438.600	99,47	Jumlah Pakaian Dinas	24 Org	24 Org			
6.3.2				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	71.260.975	71.211.534	99,93	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	35 Org	35 Org			
6.3.3				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	76.701.950	76.697.242	99,99	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek	35 Org	35 Org			
6.4				Administrasi Umum Perangkat Daerah	334.323.875	334.090.249	99,93	Jumlah Layanan Administrasi Umum	12 Bulan	13 Bulan			
6.4.1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.294.800	6.294.000	99,99	Frekuensi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	4 Kali	4 Kali			
6.4.2				Penyediaan Peralatan Perlengkapan kantor	12.050.700	12.050.700	100,00	Frekuensi Penyediaan dan Perlengkapan Kantor	12 Kali	12 Kali			
6.4.3				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.863.800	33.796.000	99,80	Frekuensi Penyediaan Bahan Logistik	12 Kali	12 Kali			
6.4.4				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.848.500	27.728.792	99,57	Frekuensi Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Kali	12 Kali			
6.4.5				Fasilitas Kunjungan Tamu	77.561.800	77.518.275	99,94	Frekuensi Penyediaan Kebutuhan Kunjungan	12 Kali	12 Kali			
6.4.6				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176.704.275	176.702.482	100,00	Frekuensi keikutsertaan pada rapat konsultasi dan koordinasi di luar daerah	12 Kali	12 Kali			
6.5				Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	216.573.900	215.572.000	99,54	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Paket	1 Paket			
6.5.1				Pengadaan Mebel	16.966.800	16.960.000	99,96	Jumlah Mebelair	4 Unit	4 Unit			
6.5.2				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	199.607.100	198.612.000	99,50	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya	2 Paket	2 Paket			
6.6				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	728.168.089	700.305.773	96,17	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan			
6.6.1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.230.000	4.220.000	99,76	frekuensi Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Kali	12 Kali			



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi		Indikator Program/Kegiatan			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
						Rp	%	Kualitatif	Kuantitatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.6.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131.303.089	129.760.773	98,83	frekuensi pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Kali	12 Kali			
6.6.3				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	592.635.000	566.325.000	95,56	frekuensi Pembayaran Jasa Pelayanan Umum	12 Kali	12 Kali			
6.7				Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	382.855.470	381.931.303	99,76	Frekuensi Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Kali	12 Kali			
6.7.1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.500.000	3.499.850	100,00	Jumlah Kendaraan dinas yang mengurus perijinan	3 Mobil	3 Mobil	salah satu mobil operasional Dinas Pengurusan berkasnya Harus dari kementerian Sosial	Sebaiknya pengurusan nya dilaksanakan pada awal tahun	
6.7.2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.897.150	80.645.953	99,69	Jumlah Kendaraan dinas yang mengurus perijinan	10 Kendaraan	10 Kendaraan			
6.7.3				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.800.000	7.700.000	98,72	Frekuensi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Kali	12 Kali			
6.7.4				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	244.980.320	244.419.805	99,77	Frekuensi Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Kali	12 Kali			
6.7.5				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.678.000	45.665.695	99,97	Frekuensi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Kali	12 Kali			
				TOTAL ANGGARAN	13.208.030.671	12.193.048.669	92%						
				TOTAL KESELURUHAN	942.288.594.924	786.903.638.147	84%						



3. HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 HASIL EPPD KOTA GORONTALO

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Gorontalo Tahun 2018 yang diumumkan pada tahun 2020 memperoleh nilai 3,4671 dengan predikat Sangat Tinggi. Capaian kinerja ini meningkat 0,05 point dibandingkan dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Gorontalo Tahun 2017 yang memperoleh nilai 3,4142 (predikat Sangat Tinggi).

Sejak tahun 2014 capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Gorontalo memperoleh predikat Sangat Tinggi. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Gorontalo Tahun 2015 dan tahun 2016 berhasil meraih peringkat 5 Nasional dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Gorontalo Tahun 2017 berhasil meraih peringkat 2 Nasional.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Gorontalo memperoleh 2 buah penghargaan dari Presiden Republik Indonesia yaitu tanda kehormatan “Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha” dan “Parasamya Purnakarya Nugraha” yaitu tanda penghargaan yang diberikan kepada daerah yang menunjukkan karya tertinggi pelaksanaan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2019, 2020, dan 2021, belum diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

3.2 OPINI LKPD KOTA GORONTALO

Perkembangan Opini BPK untuk laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Kota Gorontalo dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 8 : Opini BKP Atas Laporan Keuangan

No	Tahun	Opini	Keterangan
1	2020	WTP	Hasil Penilaian Tahun 2021
2	2021	WTP	Hasil Penilaian tahun 2022
3	2022	-	Dalam Proses Evaluasi

Sumber: Badan Keuangan (Diolah)



Berdasarkan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2020 sampai dengan 2022, laporan keuangan Kota Gorontalo memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Peningkatan capaian kinerja Tahun 2022, menandakan bahwa kinerja Pemerintah Kota Gorontalo terbilang berhasil, dan mampu dalam mempertahankan opini WTP sehingga sasaran atas indikator kinerja ini dapat tercapai. Selain itu Pemerintah Kota Gorontalo adalah satu-satunya daerah di Gorontalo yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kumalahadi yang mengindikasikan bahwa LKPD pemerintah Kota Gorontalo mendapat perhatian khusus. Pemerintah Kota Gorontalo tetap berkomitmen akan terus memperbaiki dan lebih meningkatkan lagi kinerja keuangan daerah sesuai dengan catatan yang telah dilakukan oleh BPK, terlebih lagi BPK tidak hanya melakukan audit pada laporan keuangan saja, melainkan juga melakukan audit terhadap kinerja yang dimulai dari dokumen perencanaan, penganggaran, monev, hingga pelaporan.

Penunjang keberhasilan capaian kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo ini diupayakan melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

- ❖ Menyelenggarakan perencanaan dan pengendalian anggaran yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- ❖ Mengaplikasikan SIMDA pengelolaan keuangan yang terintegrasi di semua perangkat daerah;
- ❖ Meningkatkan SDM Pengelolaan Keuangan khususnya Petugas Akuntansi mengenai ilmu akuntansi yang berdasar Standar Akuntansi Pemerintahan;
- ❖ Memberikan penguatan terhadap seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Gorontalo terkait pengelolaan keuangan daerah.
- ❖ Pencegahan terhadap pengelolaan keuangan agar kekeliruan dapat diminimalisir.
- ❖ Menyelaraskan persepsi dan pemahaman serta peningkatan pengetahuan tentang pengelolaan barang milik daerah melalui kegiatan bimbingan teknis, workshop serta pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
- ❖ Optimalisasi tata kelola barang pakai habis berbasis aktual.

4. REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Gorontalo Tahun 2022 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



Tahun Anggaran 2022, belanja daerah ditargetkan sebesar Rp. 1.331.862.165.359,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.158.115.117.533,- yang terdiri dari Belanja Operasional ditargetkan sebesar Rp. 991.798.418.360,- dengan realisasi sebesar Rp. 929.257.533.113,- Belanja Modal sebesar Rp. 338.021.558.165,- dengan realisasi sebesar Rp. 228.489.734.420,- Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 2.042.188.834,- dengan realisasi sebesar Rp. 67.850.000,- dan Belanja Transfer dengan realisasi sebesar Rp. 300.000.000,- sehingga ada penghematan sebesar Rp. 173.747.047.826,-

Target Pendapatan Daerah sebesar Rp. 979.238.977.357,- dengan realisasi Rp. 917.825.190.928 atau 93,73 %,-.

4.1 REALISASI PENDAPATAN MENURUT JENIS PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 9 : Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Tahun 2022

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
4	PENDAPATAN DAERAH	979.238.977.357	917.825.190.928	93,73
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	286.498.283.357	234.071.838.433	81,70
4.1.1	Pajak Daerah	94.961.553.576	81.099.597.772	85,40
4.1.1.06	Pajak Hotel	8.000.000.000	8.161.386.355	102,02
4.1.1.07	Pajak Restoran	19.000.000.000	17.695.327.292	93,13
4.1.1.08	Pajak Hiburan	4.000.000.000	2.495.807.974	62,40
4.1.1.09	Pajak Reklame	6.935.653.576	6.347.419.459	91,52
4.1.1.10	Pajak Penerangan Jalan	26.000.000.000	20.858.229.718	80,22
4.1.1.11	Pajak Parkir	3.250.000.000	1.450.790.923	44,64
4.1.1.12	Pajak Air Tanah	700.000.000	79.779.352	11,40
4.1.1.13	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000	0	0,00
4.1.1.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25.900.000	4.033.492	15,57
4.1.1.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	11.000.000.000	11.055.204.233	100,50
4.1.1.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	16.000.000.000	12.951.618.974	80,95
4.1.2	Retribusi Daerah	57.512.873.931	36.870.689.069	64,11
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	47.783.423.931	35.219.058.713	73,71
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	3.679.450.000	1.066.412.363	28,98
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	6.050.000.000	585.217.993	9,67
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.500.000.000	3.439.575.857	76,44
4.1.3.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	4.500.000.000	3.439.575.857	76,44
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	129.523.855.850	112.418.808.616	86,79
4.1.4.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	150.000.000	266.390.000	177,59
4.1.4.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	350.000.000	293.053.000	83,73



4.1.4.05	Jasa Giro	4.383.590.000	3.246.385.399	74,06
4.1.4.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3.165.000.000	869.451.423	27,47
4.1.4.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	550.000.000	459.391.350	83,53
4.1.4.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	850.000.000	692.376.084	81,46
4.1.4.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	250.000.000	14.748.500	5,90
4.1.4.15	Pendapatan dari Pengembalian	244.902.650	104.212.783	42,55
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	110.000.000.000	97.262.374.802	88,42
4.1.4.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	9.580.363.200	9.210.425.275	96,14
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	692.740.694.000	683.753.352.495	98,70
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	643.740.674.000	626.838.772.388	97,37
4.2.1.01	Dana Perimbangan	632.468.409.000	615.566.507.388	97,33
4.2.1.02	Dana Insentif Daerah (DID)	11.272.265.000	11.272.265.000	100,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	49.000.020.000	56.914.580.107	116,15
4.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil	49.000.020.000	56.914.580.107	116,15
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0	0,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	0	0	0,00
4.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0	0	0,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0,00
4.3.3.01	Lain-lain Pendapatan	0	0	0,00

Sumber : Badan Keuangan Kota Gorontalo, 2023

Realisasi pendapatan daerah pada Tahun 2022 sebesar Rp. 917.825.190.928,- mengalami penurunan sebesar Rp.117.898.552.873,- atau menurun sebesar 12,85% dari Tahun 2021 sebesar Rp. 1.035.723.743.801,-.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun 2022 sebesar Rp. 234.071.838.433,- atau 81,70% dari target sebesar Rp.286.498.283.357,- yang didukung dari perolehan Pajak Daerah sebesar Rp.81.099.597.772,- ; Retribusi Daerah sebesar Rp.36.870.689.069,-; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp.3.439.575.857,- ; Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp.112.661.975.735,-. Jika dibandingkan dengan Tahun 2021, PAD mengalami Penurunan sebesar 27,02% atau senilai Rp.63.248.912.546,- dari Realisasi Tahun 2022 sebesar Rp. **297.320.750.979,-**.

Pendapatan Transfer Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. **683.753.352.495,-** atau menurun dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar 4,021%, di mana realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2021 sebesar Rp. 711.267.442.822,-. Komponen Realisasi Pendapatan Transfer terdiri atas: 1). Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan realisasi sebesar Rp. **626.838.772.388,-**, terdiri atas: a). Realisasi Dana



Perimbangan terealisasi sebesar Rp. 615.566.507.388,- atau 97,33 % dari anggaran sebesar Rp. 632.468.409.000,- ; b). Realisasi Dana Insentif Daerah terealisasi sebesar Rp. 11.272.265.000,- atau 100 % dari anggaran. 2). Pendapatan Transfer Antar Daerah dengan realisasi sebesar Rp. **56.914.580.107,-** atau 116,15 % dari anggaran sebesar Rp. **49.000.020.000,-** yang hanya terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil.

4.2 REALISASI BELANJA MENURUT JENIS BELANJA

Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 10 : Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun 2022

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
5	BELANJA DAERAH	1.331.862.165.357	1.158.115.117.532	86,95
5.1	BELANJA OPERASI	991.798.418.358	929.257.533.112	93,69
5.1.1	Belanja Pegawai	434.044.775.789	420.045.158.405	96,77
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	271.443.171.089	266.454.577.566	98,16
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	79.308.133.824	77.472.160.686	97,69
5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	60.778.978.868	54.527.169.896	89,71
5.1.1.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	13.850.900.906	13.527.945.490	97,67
5.1.1.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	491.278.902	464.131.746	94,47
5.1.1.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000	791.520.000	98,74
5.1.1.88	Belanja Pegawai BOS	6.962.352.200	6.479.083.021	93,06
5.1.1.99	Belanja Pegawai BLUD	408.360.000	328.570.000	80,46
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	541.020.092.487	499.781.593.392	92,38
5.1.2.01	Belanja Barang	67.571.202.144	59.457.567.151	87,99
5.1.2.02	Belanja Jasa	192.155.930.528	173.453.739.886	90,27
5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	12.371.368.859	9.800.512.164	79,22
5.1.2.04	Belana Perjalanan Dinas	80.888.167.417	76.090.007.006	94,07
5.1.2.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	21.259.609.110	18.369.394.616	86,41
5.1.2.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	11.958.393.600	12.464.929.229	104,24
5.1.2.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	154.815.420.829	150.145.443.340	96,98
5.1.5	Belanja Hibah	11.734.679.752	5.099.040.643	43,45
5.1.5.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	11.148.291.000	4.512.651.891	40,48
	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	17.290.000	17.290.000	100,00
5.1.5.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	569.098.752	569.098.752	100,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.998.870.330	4.331.740.672	86,65
5.1.6.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	3.143.442.672	3.136.740.672	99,79



5.1.6.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1250389230	1176000000	94,05
5.1.6.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	605038428	19000000	3,14
5.2	BELANJA MODAL	338.021.558.165	228.489.734.420	67,60
5.2.1	Belanja Modal Tanah	30.000.000	1.500.000	5,00
5.2.1.01	Belanja Modal Tanah	30.000.000	1.500.000	5,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.656.351.285	52.532.788.758	77,65
5.2.2.01	Belanja Modal Alat Besar	4.771.581.072	4.455.551.900	93,38
5.2.2.02	Belanja Modal Alat Angkutan	6.274.851.454	4.603.114.198	73,36
5.2.2.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	230.348.350	237.706.285	103,19
5.2.2.04	Belanja Modal Alat Pertanian	130.685.000	130.198.000	99,63
5.2.2.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	21.103.134.945	6.277.086.010	29,74
5.2.2.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	876.393.640	699.345.862	79,80
5.2.2.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	24.026.619.626	26.358.620.693	109,71
5.2.2.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	4.421.099.000	4.224.627.850	95,56
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	5.390.965.598	5.120.701.980	94,99
5.2.2.12	Belanja Modal Alat Pengeboran	40.000.000	40.000.000	100,00
	Belanja Modal Eksplorasi	5.000.000	1.275.560	25,51
5.2.2.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0	4.560.420	#DIV/0!
5.2.2.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	331.600.000	331.600.000	100,00
5.2.2.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	54.072.600	48.400.000	89,51
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	128.069.772.854	92.881.142.181	72,52
5.2.3.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	126.406.960.632	91.636.217.076	72,49
	Belanja Moda Monumen	155.554.000	108.622.500	69,83
5.2.3.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.507.258.222	1.136.302.605	75,39
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	138.847.075.426	80.269.409.419	57,81
5.2.4.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	103.107.781.684	53.972.160.041	52,35
5.2.4.02	Belanja Modal Bangunan Air	31.881.841.742	22.444.749.478	70,40
5.2.4.03	Belanja Modal Instalasi	3.702.452.000	3.698.152.000	99,88
5.2.4.04	Belanja Modal Jaringan	155.000.000	154.347.900	99,58
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.418.358.600	2.804.894.062	82,05
5.2.5.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	2.821.773.600	2.233.058.017	79,14
5.2.5.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	150.000.000	149600000	99,73
5.2.5.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	446.585.000	422.236.045	94,55
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.042.188.834	67.850.000	3,32
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	2.042.188.834	67.850.000	3,32
5.3.1.01	Belanja Tidak Terduga	2.042.188.834	67.850.000	3,32
5.4	BELANJA TRANSFER	0	300.000.000	0
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0	300.000.000	0

Sumber : Badan Keuangan Kota Gorontalo, 2022



Anggaran Belanja Tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp. **1.331.862.165.357,-** terealisasi sebesar Rp. **1.158.115.117.532,-** atau 86,95%. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja tahun 2021 meningkat sebesar 10,57% atau senilai Rp.122.391.373.731. Realisasi Belanja dibawah 90%, hal ini disebabkan Anggaran Pinjaman Daerah PEN Kota Gorontalo terutama pada Komponen Belanja Modal, Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kota Baru, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Peningkatan Kapasitas SPAM Kota Gorontalo; Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas Jalan Nani Wartabone serta Revitalisasi Koridor Kawasan Pusat Perdagangan.

4.3 REALISASI PEMBIAYAAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN

Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 10 : Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan Tahun 2022

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
6	PEMBIAYAAN	369.604.081.036	327.048.317.745	88,49
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	361.113.634.519	319.447.595.128	88,46
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	104.830.335.659	104.727.565.971	99,90
6.1.1.01	Pelampauan Penerimaan PAD	12.220.450.557	12.220.450.557	100,00
6.1.1.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	21.852.304.902	21.849.160.868	99,99
	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	3.144.162.265	3.144.162.265	100,00
	pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan Daerah ysng Sah	1.350.095.423	1.319.800.423	97,76
	Penghematan Belanja	67.850.000	67.850.000	100
6.1.1.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	13.802.021	13.802.021	100,00
6.1.1.08	Sisa Belanja Lainnya	66.181.670.491	66.112.337.966	99,90
6.1.1.99	Koreksi SiLPA	0	1.871	0
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	256.283.298.860	214.720.029.157	83,78
6.1.4.04	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	256.283.298.860	214.720.029.157	83,78
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.490.446.517	7.600.722.617	89,52
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000	5.000.000.000	100,00
6.2.2.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	5.000.000.000	5.000.000.000	100,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	3.490.446.517	2.600.722.617	74,51



6.2.3.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	0	0	0
6.2.3.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	3.490.446.517	2.600.722.617	74,51

Sumber : Badan Keuangan Kota Gorontalo, 2022

Penerimaan Pembiayaan ditetapkan Rp**361.113.634.519,-** dengan realisasi sebesar Rp**319.447.595.128,-** Realisasi terendah terdapat pada Penerimaan Pinjaman Daerah, yang semula direncanakan akan menerima sebesar Rp**256.283.298.860,-** namun terealisasi hanya Rp**214.720.029.157,-** atau hanya sebesar 83,78,18 %.

6. INOVASI DAERAH

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bentuk dan kriteria inovasi daerah sebagaimana penjelasan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah antara lain :

- Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah yang merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- Inovasi Pelayanan Publik yang merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- Inovasi Daerah lainnya yang merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2022 Pemerintah Kota Gorontalo mengusulkan 25 (dua puluh lima) inovasi dalam kompetensi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sistim Elektronik Informasi Kompetensi (sierik)
2. Produk Unggulan Berlabel (puber)
3. Majalah Elektronik (e-magazine)
4. Tim Kreatif Promosi Pariwisata Kepemudaan dan Olah raga
5. Tim Kreatif Pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi keratif
6. Pengawasan Transaksi Jual Beli Tanah dan Rumah Berbasis *Mobile Android* untuk meningkatkan penyerapan bea perelohan hak
7. Penerapan Teknologi Sensus Pajak



8. Penerapan Teknologi Mobile untuk satu layanan pajak (*one tax service go*)
9. Aplikasi Pelayanan Cuti Online (*sition*)
10. Layanan Sistem Pengaduan Berbasis Elektronik (*lasimpebe*)
11. Rekonstruksi Perbaikan Pengolahan Pendidikan melalui Penerapan Sistem pola kerja terpadu (*work intergrated system*)
12. Ipteks (inovasi pengembangan terhadap karakterisasi siswa)
13. Implementasi dan Revitalisasi Kearifan Lokal melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di SMPN 10 Gorontalo dalam mengembangkan budaya daerah.
14. Pemanfaatan Alat Peraga patok-patok statistik dalam materi tuan medis
15. Kiat jitu membangun karakter siswa melalui proyek bersatu dan kekal di SMPN 1 Kota Gorontalo
16. Pengembangan media pembelajaran mandiri guru sebagai inovasi pendidik pada pembelajaran di SMPN 12 Kota Gorontalo
17. Ekslida
18. Meningkatkan literasi digital siswa melalui *Spenfour e-news*
19. Pikat (pita karakter)
20. Jadi murid asuh sekelas (*dimas*)
21. Bina suasana
22. Penerapan *Project Based Learning* dalam mengeksplorasi dan merekomendasi kreativitas seni mengunyam dari enceng gondok
23. Mengenalkan Budaya Daerah melalui pembelajaran *projects* dengan tema kearifan lokal (topik permainan tradisional)
24. Losari (lomba seni dan sastra online)
25. Peningkatan Kompetensi Guru dalam pembelajaran jarak jauh jauh dimasa pandemi Covid -19 melalui audio visual FB *Spenfour* Gorontalo.

Dari upaya yang dilakukan selama tahun 2022, Pemerintah Kota Gorontalo meraih beberapa penghargaan sebagai berikut :

Tabel 12: Daftar Penghargaan/Prestasi Pemerintah Kota Gorontalo

No.	Uraian	Tingkat	Tahun Perolehan	Penyelenggara
1	Anugerah Digital Inovation Award 2022 kategori <i>Digital Inovation for Public Service</i> dengan Aplikasi GoMT	Nasional, Jakarta	31 Maret 2022	Badan Kepegawaian Nasional Kantor Regional XI, di Bandung
2	Terbaik I Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Provinsi Gorontalo Tahun 2022	Provinsi Gorontalo	18 April 2022	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo



3	Terbaik I Kompetisi Inovasi Government Award Tahun 2021 tingkat OPD Provinsi Gorontalo <i>Inovasi One Tax Service Go</i>	Provinsi Gorontalo	18 April 2022	Kementerian Dalam Negeri RI, di Jakarta
4	Anugerah Tanda Mata atas Partisipasi dan Kontribusi dalam Pengembangan dan Kebijakan Positif Bagi Pendidikan Agama Islam di Sekolah	Nasional, Bali	20 Mei 2022	Kementerian Kesehatan RI, di Jakarta
5	26 Top Nasional / Tertinggi Provinsi Gorontalo MCP Korsupgah KPK RI nilai 93,5 Tahun 2021	Nasional, Jakarta	2 Juli 2022	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Jakarta
6	Terbaik 1 Capaian Target PSA 2022 Tingkat Provinsi Gorontalo dalam rangka Harganas ke- 29 Tahun 2022	Nasional, Jakarta	7 Juli 2022	Kementerian Dalam Negeri RI, di Jakarta
7	Juara 3 Nasional Tingkat Kabupaten/Kota pelayanan KB Serentak Sejuta Apseptor Target Total 500 – 1500	Nasional, Jakarta	7 Juli 2022	Menteri Koordinator Perekonomian RI, di Jakarta
8	Juara 3 Nasional BKN Award Implementasi penerapan manajemen kinerja Tahun 2022	Nasional, Batam	21 Juli 2022	MNC Portal, di Jakarta
9	Peringkat 5 Nasional kategori penerapan pemanfaatan data sistem informasi dan CAT	Nasional, Batam	21 Juli 2022	Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo
10	Apresiasi Kota Layak Anak Tahun 2022	Nasional, Jakarta	22 Juli 2022	PGRI Provinsi Gorontalo
11	Tokoh Inisiator Olah Raga Tahun 2022	Nasional, Kendari	2 Agustus 2022	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Jakarta
12	Anugerah Meritokrasi Penerapan Sistem Merit Manajemen ASN Bagi Instansi Pemerintah dengan Kategori Baik	Nasional, Jakarta	12 Agustus 2022	Badan Kepegawaian Nasional RI
13	TPID Terbaik kategori IHK Wilayah Sulawesi	Nasional, Surabaya	14 September 2022	Kementerian Keuangan RI
14	Anugerah BI Mitra Strategis Terkolaboratif Dalam Mendukung Edukasi Cinta Bangsa Paham Rupiah Wilayah Gorontalo	Provinsi Gorontalo	30 November 2022	Kementerian Keuangan RI
15	Peringkat Pertama Pemerintah Daerah Dengan Kapasitas Fiskal Terbaik Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo	12 Desember 2022	Pemerintah Provinsi Gorontalo
16	Penghargaan Capaian Opini WTP Minimal 5 kali berturut - turut atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah	Provinsi Gorontalo	12 Desember 2022	BPJS Kesehatan, Provinsi Gorontalo

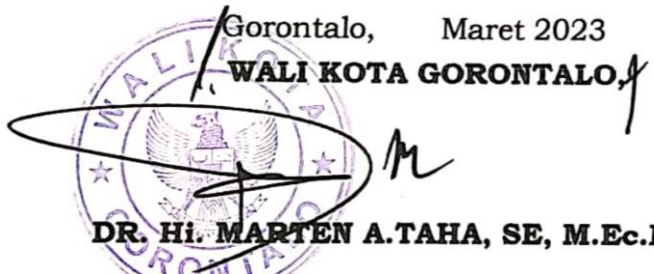


17	Penghargaan Capaian Opini WTP atas penyusunan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah	Provinsi Gorontalo	12 Desember 2022	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Virtual)
18	Penghargaan Kepala Daerah yang Peduli Dalam Komunikasi Publik melalui RRI Gorontalo	Provinsi Gorontalo	29 Desember 2022	PLT. Kepala Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Gorontalo secara rinci dan terstruktur telah diuraikan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Gorontalo Tahun 2022 mencakup urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Urusan Pemerintahan Umum, Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan serta Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Cakupan ruang lingkup dimaksud telah ditetapkan dan dilaksanakan secara sistematis sejak perencanaan penganggaran pelaksanaan dan evaluasinya oleh perangkat daerah selaku penanggungjawab sesuai tugas pokok dan fungsi. Target kinerja yang telah ditetapkan harus dapat dicapai kurun waktu 1 (satu) tahun. Capaian kinerja inilah yang dilaporkan Kepala Daerah melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) untuk dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Penyajian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) ini kami sadari masih memiliki keterbatasan sehingga diharapkan saran dan masukan konstruktif dari semua pihak dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Gorontalo untuk mewujudkan masyarakat Sejahtera, Maju, Aktif, Religius, Terdidik (SMART) .

Gorontalo, Maret 2023
WALI KOTA GORONTALO,

DR. Hi. MARTEN A.TAHA, SE, M.Ec.Dev.